

**EVALUASI PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
PESISIR DI KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN
BANYUWANGI, JAWA TIMUR
TAHUN 1991/1992-2013/2014**

**LAPORAN SKRIPSI
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN**

Oleh:
YULIAN MARIYANI
0310810076



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERIKANAN
MALANG
2007**

EVALUASI PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN
PESISIR DI KECAMATAN MUNCAR, KABUPATEN
BANYUWANGI, JAWA TIMUR
TAHUN 1991/1992-2013/2014

Oleh:
YULIAN MARIYANI
0310810076

Mengetahui,
Dosen Penguji I

Menyetujui, Dosen
Pembimbing I

(Ir. Mulyanto, MS)
Tanggal:

(Ir. Sri Sudaryanti, MS)
Tanggal:

Dosen Penguji II

Dosen Pembimbing II

(Dr. Uun Yanuhar, Spi, MS)
Tanggal :

(Ir. Herwati Umi S, MS)
Tanggal:

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(Ir. Abdul Koid, MS)
Tanggal :

RINGKASAN

YULIAN MARIYANI. Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Pesisir di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur tahun 1991/1992-2013/2014 (dibawah bimbingan **Ir. SRI SUDARYANTI, MS** dan **Ir. HERWATI UMI S, MS**)

Pencemaran dan "overfishing" yang terjadi di pesisir Muncar merupakan salah satu indikator bahwa perencanaan pengelolaan pesisir tidak dilakukan secara terpadu. Selama ini penelitian dalam bidang manajemen sumberdaya perairan lebih ke substansi teknik seperti mangrove, ikan, lamun tetapi untuk penelitian menajemennya terutama yang fokus pada evaluasi belum pernah dilakukan (komunikasi pribadi Sudaryanti, 2007)*. Materi yang dievaluasi adalah proses perencanaan sumberdaya perairan khususnya pesisir. Informasi yang diperoleh dari evaluasi dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perencanaan pengelolaan pesisir di masa depan.

Tujuan dari penelitian ini salah satunya adalah untuk proses perencanaan yang selama ini dilakukan dan status perencanaannya. Penelitian dilakukan pada tanggal 29 Januari-21 Februari 2007.

Metode yang digunakan adalah metode survai. Pada penelitian ini, data yang diambil meliputi data primer yaitu proses perencanaan dan data sekunder berupa dokumen.. Penentuan sampel dengan menggunakan "Snowball Sampling Technique" yang di kombinasi dengan 'stakeholders' yang ada. Analisis data menggunakan "professional judgement" dengan komparasi metode ZOPP.

Hasil penelitian diperoleh profil masyarakat Muncar. Jumlah penduduk Muncar bulan Desember 2006 berjumlah 125.692 jiwa yang terdiri dari 63.173 jiwa laki-laki dan 62.519 jiwa perempuan. Tingkat pendidikan masyarakat paling banyak adalah tamat SD/Sederajat sebesar 44.825 jiwa (41,14%) sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah tingkat sarjana yaitu sebesar 938 jiwa (0,86%). Mata pencaharian penduduk Muncar sebagian besar adalah pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 35.681 jiwa (62,91%). Dari jumlah ini yang berprofesi sebagai nelayan mencapai 11.958 jiwa yang terdiri dari 1.028 jiwa juragan dan 10.930 jiwa pendega. Untuk bidang industri pengolahan sebanyak 6.407 jiwa (11,41%). Di bidang bangunan 1.052 jiwa (1,85%), perdagangan 8.575 jiwa (15,12), angkutan 898 jiwa (1,58%), keuangan 610 jiwa (1,07%) dan jasa 3372 jiwa (5,95%).

Profil kegiatan di pesisir Muncar meliputi penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penambahan atau pengembangan alat tangkap dan nelayan andon, budidaya keramba jaring apung, budidaya tambak, pendaratan ikan di TPI, berkembangnya kawasan industri pengolahan perikanan, pemukiman di sekitar bantaran sungai, dan aktivitas pembuangan limbah industri dan limbah domestik. Dari berbagai profil kegiatan yang dilakukan menunjukkan pemanfaatan pesisir oleh banyak sektor. Analisis masalah menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang ada meliputi

masalah teknis, sosial, tata ruang. Penyelesaian masalah pencemaran belum pernah dilakukan, sampai saat ini baru usulan program dari masing-masing dinas terkait.

Proses perencanaan di Muncar menurut 60,01% responden yang semuanya berasal dari perwakilan instansi menyatakan proses perencanaan bersifat "Bottom Up" tetapi tidak ada data untuk mendukung pernyataan tersebut. Instansi tidak terbuka dalam komunikasi karena enggan kinerja kantornya dievaluasi. 29,41% responden mengaku tidak dilibatkan sampai tahap pengambilan keputusan atau bersifat "Top Down". Pengambilan keputusan yang bersifat "Top Down" menyebabkan adanya tumpang tindih perencanaan dalam pemanfaatan ruang pesisir oleh sektor terkait. Akibatnya perencanaan pengelolaan pesisir masih bersifat sektoral

Analisis partisipatif 73,33% responden selalu terlibat dalam proses perencanaan, 26,67% tidak selalu dilibatkan dan 6,67% tidak pernah dilibatkan. Bentuk partisipasi dalam proses perencanaan adalah pasif karena "stakeholders" tidak dilibatkan sampai pengambilan keputusan. Mengenai alasan mereka mau berpartisipasi dalam perencanaan karena kesadaran diri (33,33%), karena status sebagai tokoh masyarakat (13,33%) dan karena pengabdian pada negara (66,67%). Bentuk peran serta masyarakat adalah aktif dengan tingkat partisipasi memberikan informasi yang diperlukan dan tingkat partisipasi fungsional. Dalam metode ZOPP partisipasi seperti ini kurang sempurna karena tidak melibatkan sampai pengambilan keputusan.

Faktor pendukung dalam perencanaan pesisir adalah (1) karena mulai ada keinginan masyarakat untuk berperan serta mengelola sumberdaya pesisir 46,67%; (2) karena adanya upah 20%. Untuk faktor penghambatnya antara lain (1) kurangnya koordinasi dan kerjasama antar "stakeholders" 50%, yang mengakibatkan pelaksanaan tidak sesuai dengan hasil perencanaan sehingga timbul rasa malas untuk mengikuti rapat; (2) masyarakat tidak dilibatkan dalam seluruh proses perencanaan 33,33%; (3) tidak bisa menentukan skala prioritas sebesar 33,33%. Hal ini dikarenakan kurangnya data yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan

Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Profil kegiatan yang dilakukan di pesisir Muncar melibatkan banyak sektor antara lain perikanan, perindustrian, pemukiman dan lingkungan hidup. Profil masalah menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang ada baik yang bersifat teknis, sosial, tata ruang dan penegakan hukum. (2) Proses perencanaan pengelolaan pesisir Muncar selama ini belum terpadu. (3) Faktor pendorongnya adalah mulai ada keinginan dari masyarakat untuk berperan serta dalam mengelola sumberdaya pesisir dan adanya upah dalam pelaksanaan program. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya koordinasi dan kerjasama antar "stakeholders" sehingga mengakibatkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan hasil rencana, masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam seluruh proses perencanaan artinya tidak sampai pada tahap pengambilan keputusan, sulitnya menentukan skala prioritas.

Saran kebijakan untuk pemerintah yaitu perencanaan pengelolaan pesisir muncar sebaiknya dilakukan secara terpadu dan partisipatif dengan melibatkan "stakeholders" serta ditunjang dengan bahan kajian baik dari tata ruang, sosial serta ekosistem. Agar perencanaan tersebut bisa berjalan perlu dibentuk lembaga/komisi independen non pemerintah yang tugasnya mengkoordinasikan instansi terkait, masyarakat dan "stakeholders" lainnya untuk pengambilan keputusan pengelolaan wilayah pesisir. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengkaji kondisi yang ada di wilayah pesisir tapi juga kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan melibatkan responden dari pihak legislatif, eksekutif, yudikatif dan Perguruan Tinggi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Alloh S.W.T yang dengan rahmat dan hidayah-Nya pemulisan laporan skripsi ini dapat terselsaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana perikanan di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.

Atas terselesaikannya laporan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

- » Ibu Ir. Sri Sudaryanti, MS. selaku Dosen Pembimbing I
- » Ibu Ir. Herwati Umi S, MS. selaku Dosen Pembimbing II

Atas segala petunjuk dan bimbingannya sejak penyusunan usulan penelitian sampai dengan terselesainya penyusunan laporan skripsi ini.

- » Keluarga Besar saya Bapak, ibu, suami dan adik atas segala do'a dan motivasinya
- » Keluarga Bapak Suhaimi atas dorongan dan bantuannya selama ini
- » Semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusunnya laporan skripsi ini

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berminat dan memerlukan.

Malang, Mei 2007

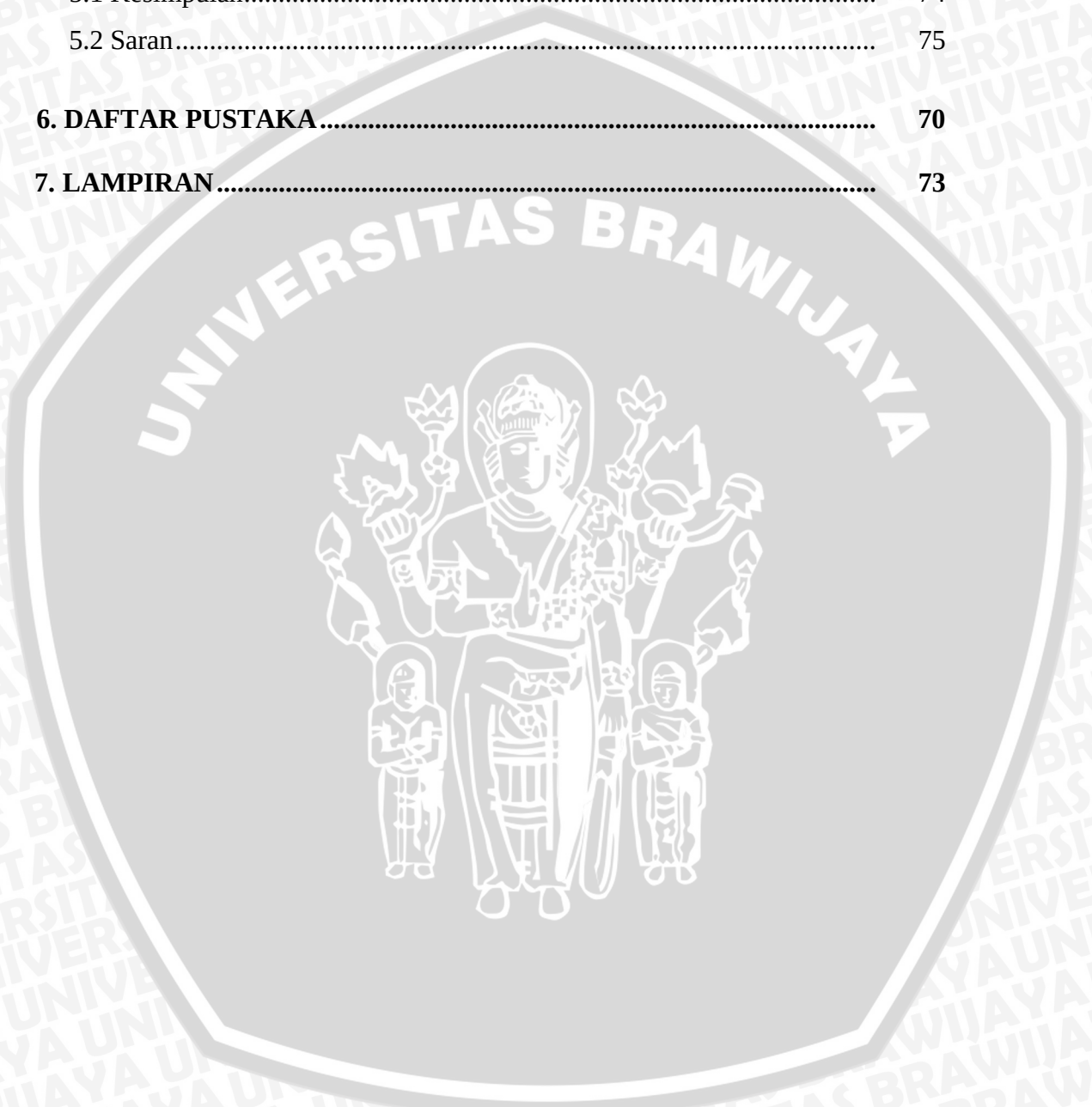
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 1. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Tempat dan Waktu	6
 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
2.1 Pengertian Evaluasi	7
2.1.1 Model Evaluasi	8
2.1.2 Masalah Evaluasi	9
2.2 Konsep dan Definisi Pengelolaan Wilayah Pesisir	9
2.2.1 Batas Wilayah Pesisir	9
2.2.2 Perencanaan Terpadu	11
2.2.3 Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu.....	13
2.2.4 Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Sektoral..	14
2.2.5 Masalah dalam Pengelolaan pesisir	15
2.3 Alat-alat Perencanaan.....	17
2.3.1 Analisis SWOT	17
2.3.2 AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>)	18
2.3.3 ZOPP (<i>Ziel Orientierte Projekt Planung</i>)	19
2.3.4 Masalah dalam Perencanaan.....	22
2.4 Partisipasi Masyarakat	23
2.4.1 Manfaat dan Kerugian Partisipasi Masyarakat	23

2.4.2 Cara Menyelenggarakan Partisipasi Masyarakat	24
2.4.3 Tingkat Partisipasi.....	25
2.5 Pengendalian Pencemaran.....	26
2.5.1 Pengertian Pencemaran Laut.....	26
2.5.2 Bahan Pencemar.....	26
2.5.3 Sumber Pencemaran.....	27
2.5.4 Dampak Pencemaran Laut	28
2.5.5 Usaha Pengendalian Pencemaran Laut	30
3. METODOLOGI.....	32
3.1 Materi Penelitian	32
3.2 Metode penelitian.....	32
3.3 Tahapan Penelitian	32
3.4 Data	33
3.4.1 Jenis dan Sumber Data	33
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	34
3.4.3 Teknik Penentuan Responden	36
3.5 Analisis Data	39
4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Letak Geografis dan Topografi	41
4.1.2 Kondisi Masyarakat.....	42
4.1.2.1 Penduduk menurut umur	42
4.1.2.2 Penduduk menurut pendidikan.....	43
4.1.2.3 Jenis mata pencaharian penduduk	43
4.1.3 Struktur Kelembagaan.....	45
4.1.4 Keadaan Umum Kondisi Pesisir Muncar	45
4.2 Profil dan Karakter Responden	51
4.3 Profil Kegiatan dan Masalah di Pesisir Muncar	54
4.4 Proses Perencanaan Pesisir Muncar selama ini	56
4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pesisir Muncar.....	68

4.6 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Perencanaan Pengelolaan Pesisir Muncar	70
5. KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
6. DAFTAR PUSTAKA.....	70
7. LAMPIRAN.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar dokumen yang diperoleh dalam penelitian	36
2. Daftar responden	37
3. Jumlah penduduk Muncar menurut golongan usia tahun 2006	42
4. Jumlah penduduk Muncar menurut pendidikan tahun 2006	43
5. Jumlah angkatan kerja kecamatan Muncar yang bekerja menurut sektor lapangan usaha bulan Desember 2006	44
6. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2001-2005.....	49
7. Daftar perusahaan pengolahan perikanan di Muncar.....	51
8. Karakteristik responden berdasarkan mata pencaharian	52
9. Karakteristik responden berdasarkan umur dan jenis kelamin	53
10. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan formal.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan perumusan masalah penelitian	4
2. Tiga tipe pengawasan	8
3. Proses perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan	12
4. Bagan analisis hasil	40
5. Proses perencanaan pembangunan daerah Muncar Tahun 2005	57
6. Diagram alir pembentukan rencana dan aturan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis komunitas yang partisipatif	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Hasil pengamatan di perairan pantai Muncar pada tanggal 29 Oktober 2006.....	79
2. Keadaan pencemaran perairan Muncar oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga tahun 2004.....	81
3. Tahapan penelitian	82
4. Peta wilayah kecamatan Muncar.....	87
5. Profil kegiatan dan masalah di pesisir Muncar	88
6. Variabel dan indikator penelitian.....	91



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan di bumi yang memiliki produktivitas hayati tertinggi. Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumberdaya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu, kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional sejak awal Pelita I. Selain menyediakan berbagai sumberdaya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah (Dahuri *et al.*, 2001).

Kelimpahan keanekaragaman hayati wilayah pesisir, merupakan potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan secara bertanggungjawab dalam suatu kerangka pola pengelolaan yang bermuatan pada aspek (1) secara ekologis dan biologis, terpeliharanya kelestarian sumberdaya dan daya dukung; (2) secara ekonomi, pembangunan pesisir pantai mampu memberikan keuntungan bagi seluruh pelaku ekonomi dan pertumbuhan ekonomi; (3) secara sosial, merupakan jaminan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir terutama masyarakat miskin; (4) secara politik, mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan dan bagi penguatan kesatuan bangsa. Tidak berimbangnya penempatan komponen pola pengelolaan sumberdaya perikanan akan menimbulkan permasalahan yang berdimensi luas dan saling terkait (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2004).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah Jawa Timur yang mempunyai potensi sumberdaya ikan yang cukup besar khususnya wilayah perairan Selat Bali dengan kegiatan perikanannya terpusat di daerah Muncar. Pada saat sekarang kondisi perairan Selat Bali mengalami beban-beban yang cukup berat diantaranya beban tangkap berlebih atau "Overfishing". Potensi ikan pelagis yang dominan lemuru sebesar 46.400 ton/tahun untuk jumlah yang boleh ditangkap dalam rangka pengelolaan berkelanjutan yaitu 80% sekitar 25.120 ton/tahun sedangkan produksinya 27.500 ton.

Salah satu penyebab "overfishing" di Muncar adalah penambahan atau pengembangan alat tangkap. Saat ini purse sein merupakan alat tangkap yang dominan dilihat dari produksi tangkapan per tahunnya. Tahun 2005 ada sekitar 212 unit purse sein di Muncar. Menurut studi penentuan JTB (Jumlah Tangkap Berlebih) Selat Bali oleh Badan Pertimbangan Pengembangan Penelitian (BPPP) Universitas Brawijaya Malang Tahun 2004 idealnya adalah yaitu 100 unit purse sein (dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2006-2010).

Kondisi Muncar pada saat ini memerlukan perhatian yang serius akibat pencemaran terutama di kawasan sekitar industri perikanan. Hal ini dapat dilihat dari air sungai yang bau dan banyak busanya serta warna airnya yang sudah hitam a). Berdasarkan hasil pengamatan di lapang (Lampiran 1) menunjukkan bahwa perairan pantai Muncar telah tercemar oleh berbagai limbah industri dan limbah rumah tangga. Bila pencemaran yang ada tidak segera ditangani dikhawatirkan dalam tahun-tahun mendatang Muncar hanya akan tinggal nama saja. Padahal, keberadaan Muncar memberikan arti penting bagi Provinsi Jawa Timur karena memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan (Dewi, 2006).

a) Radar Banyuwangi, 4 Agustus 2006

Pencemaran perairan di Muncar merupakan sebagian indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan menuju ke arah yang tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Moesa (2002) bahwa jika dalam pemanfaatan sumberdaya hanya dilakukan secara rutin, tanpa perencanaan dini, dapat diperkirakan akan menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah pencemaran.

Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan selama ini bersifat tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Namun, kasepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya terutama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan yang selama ini dijalankan secara sektoral dan terpilah-pilah. Apabila perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan tidak dilakukan secara terpadu, maka dikhawatirkan sumberdaya tersebut akan rusak atau punah, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil dan makmur (Dahuri *et al.*, 2001).

Rencana pengelolaan pesisir Muncar diatur melalui rencana detail tata ruang kota Muncar tahun 1991/1992-2013/2014. Pencemaran dan "overfishing" yang terjadi di pesisir Muncar merupakan hasil pelaksanaan kegiatan dari perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut Dahuri *et al* (2001) masalah pencemaran dan "overfishing" merupakan salah satu indikator bahwa perencanaan pengelolaan pesisir tidak dilakukan secara terpadu. Selama ini penelitian dalam bidang manajemen sumberdaya perairan lebih ke substansi teknik seperti mangrove, ikan tetapi jarang dilakukan penelitian mengenai manajemennya (komunikasi pribadi Sudaryanti, 2007) b). Dalam kerangka

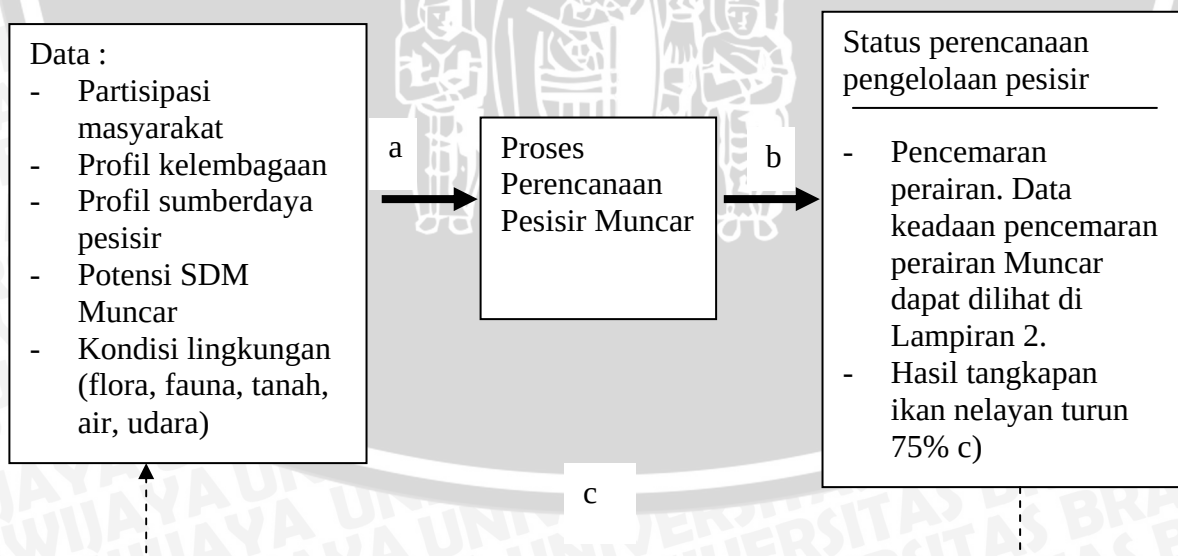
b) Dosen Program Studi MSP, Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya, Malang

pikir manajemen kita mengenal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Evaluasi dianggap sebagai momok yang siap menjatuhkan pihak pengelola sehingga evaluasi jarang dilakukan.

Penelitian ini fokus ke evaluasi dengan obyeknya adalah perencanaan pengelolaan pesisir. Kategori evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi untuk tahap kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu mencoba menganalisis hasil pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan. Informasi yang diperoleh dari evaluasi proses perencanaan pengelolaan pesisir di Muncar dapat dipergunakan sebagai masukan untuk melakukan perencanaan pengelolaan pesisir di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini tidak didekati dengan filosofi tentang manajemen tetapi menggunakan pendekatan teknis. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan perumusan masalah (Gambar 1).



Gambar 1. Bagan perumusan masalah penelitian

c) Keterangan Zainullah Baijuri, tokoh nelayan Muncar

Berdasarkan Gambar 1 bisa dijelaskan sebagai berikut :

- a. Data partisipasi masyarakat, data profil kelembagaan, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya pesisir serta kondisi lingkungan seperti flora, fauna, tanah, air dan udara merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam proses perencanaan.
- b. Dari hasil perencanaan pesisir Muncar selama ini ternyata mengalami pencemaran dan penurunan hasil tangkapan ikan nelayan. Diduga status perencanaan pengelolaan pesisir Muncar masih belum terpadu.
- c. Perlu evaluasi mengenai proses perencanaan yang selama ini dilakukan sebagai masukan untuk perencanaan pesisir selanjutnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui profil kegiatan dan masalah dalam perencanaan pengelolaan kawasan pesisir
2. Mendapatkan proses perencanaan yang selama ini dilakukan dan mengetahui status perencanaanya
3. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam perencanaan pengelolaan kawasan pesisir

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bagi :

1. Akademisi, salah satu bentuk transfer informasi tentang perencanaan pengelolaan kawasan pesisir

2. "Stakeholders", masukan bagi perencanaan pengelolaan pesisir selanjutnya dalam upaya pengendalian pencemaran dan para pengambil keputusan khususnya bagi instansi pemerintah yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan kawasan pesisir Muncar, seperti BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bagian Lingkungan Hidup, Disperindag, Dinas Kimpraswil serta masyarakat Muncar.

1.5 Tempat dan Waktu

Penelitian ini berlokasi di pesisir Muncar melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur dan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari sampai 21 Februari 2007.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Evaluasi

Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan "controlling", antara lain "evaluating", "appraising" atau "correcting". Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Handoko, 2000).

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan kembali. Evaluasi sangat berhubungan dengan perencanaan, evaluasi yang baik dapat dilaksanakan apabila didasarkan pada rencana yang baik, dan sebaliknya, rencana yang baik tidak akan dapat diciptakan bila tidak didasarkan atas umpan balik dari evaluasi (Aji dan Sirait, 1984).

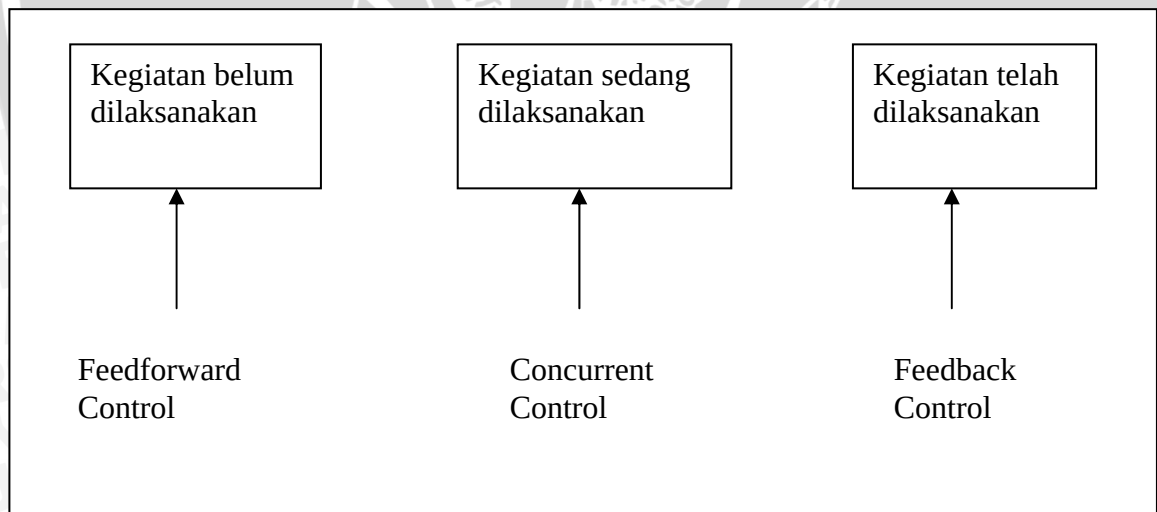
Disebutkan oleh Mitchell *et al* (2003), bahwa pemantauan dilakukan karena beberapa alasan sebagai berikut :

- 1). Untuk mengevaluasi kondisi umum lingkungan
- 2). Membuat data dasar lingkungan, kecenderungan dan akibat-akibat ganda
- 3). Mendokumentasikan beban lingkungan, sumberdaya dan dampak
- 4). Menguji model lingkungan dan hasil penelitian
- 5). Menentukan efektifitas peraturan lingkungan
- 6). Mendidik masyarakat tentang kondisi lingkungan
- 7). Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan

2.1.1 Model Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni : (a) Evaluasi kinerja; (b) Evaluasi "outcomes", dan (c) Evaluasi kemampuan (kapasitas) pengelolaan. Evaluasi kinerja meliputi hal-hal yang berkaitan dengan mutu dari pelaksanaan kegiatan, dan tingkat pencapaian dari tujuan kegiatan. Evaluasi "outcomes" mencakup dampak dari kegiatan pengelolaan terhadap sumberdaya pesisir dan masyarakat di wilayah pesisir tersebut. Evaluasi kemampuan pengelolaan biasanya dilakukan untuk menentukan kecukupan dari struktur dan proses pengelolaan, relatif terhadap standar dan pengalaman internasional (Budiharsono, 2001).

Handoko (2000) menyatakan ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu (1) pengawasan pendahuluan, (2) pengawasan "concurrent", dan (3) pengawasan umpan balik, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini (Gambar 2).



Gambar 2. Tiga tipe pengawasan

Ketiga bentuk pengawasan tersebut sangat berguna bagi manajemen. Pengawasan pendahuluan cukup memadai untuk memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan.

2.1.2 Masalah Evaluasi

Usaha-usaha evaluasi yang dilakukan terhadap suatu proyek yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai berkisar soal tanggungjawab dari pengelola proyek terhadap kelambatan-kelambatan yang terjadi pada pelaksanaan proyek. Hal ini menyebabkan evaluasi dianggap sebagai momok yang siap menjatuhkan pengelola proyek, akibatnya evaluasi menjadi tidak populer (Aji dan Sirait, 1984).

Menurut Handoko (2000) tipe pengawasan pendahuluan dan pengawasan "concurrent" memiliki kekurangan antara lain : biaya keduanya mahal, banyak kegiatan yang tidak memungkinkan dirinya dimonitor secara terus menerus dan pengawasan yang berlebihan akan menjadikan produktifitas berkurang. Oleh karena itu manajemen harus menggunakan sistem pengawasan yang paling sesuai bagi situasi tertentu.

2.2 Konsep dan Definisi Pengelolaan Wilayah Pesisir

2.2.1 Batas Wilayah Pesisir

Pertanyaan pertama yang seringkali muncul dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah bagaimana menentukan batas dari suatu wilayah pesisir "coastal zone". Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri, 2003).

Budiharsono (2001) menyatakan bahwa wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam empat jenis wilayah, antara lain :

- 1). Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah yang memproduksi ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya yang tergolong di bawah garis kemiskinan

- 2). Sebagai wilayah nodal d), wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang, sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang "backyard" yang merupakan tempat membuang segala macam limbah
- 3). Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administrasi yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa Kabupaten/kota pada kabupaten/kota yang berupa pulau kecil
- 4). Sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan dengan kriteria ekologis. Karena menggunakan kriteria ekologis tersebut, maka batas wilayah pesisir sering melewati batas-batas satuan wilayah administratif.

Batas fisik suatu wilayah pesisir untuk kepentingan pengelolaan tidak ditentukan secara kaku ("rigid"). Akan lebih berarti, jika penetapan batas-batas suatu wilayah pesisir didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan beserta segenap sumberdaya yang ada di dalamnya, serta tujuan dari pengelolaan itu sendiri. Jika tujuan pengelolaan adalah untuk mengendalikan atau menurunkan tingkat pencemaran perairan pesisir yang dipengaruhi aliran sungai, maka batas wilayah pesisir ke arah darat hendaknya mencakup suatu daratan DAS (Daerah Aliran Sungai) dimana buangan limbah disini akan mempengaruhi kualitas perairan pesisir. Sedangkan ke arah laut meliputi daerah laut yang masih dipengaruhi oleh pencemaran yang berasal dari darat tersebut (Dahuri *et al.*, 2001).

d) nodal : menekankan perbedaan dua komponen wilayah yang terpisah berdasarkan fungsinya

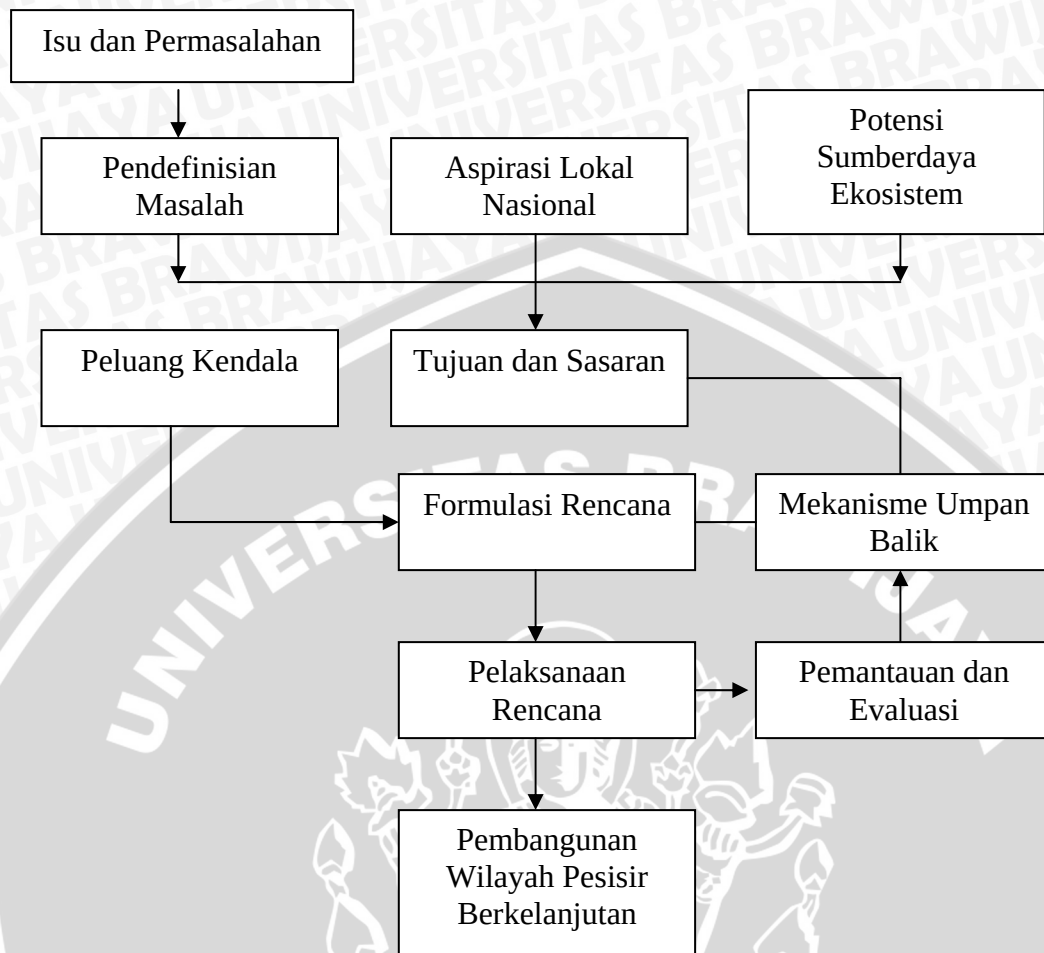
2.2.2 Perencanaan Terpadu

Perencanaan dapat dikatakan sebagai keputusan awal yang diambil sebelum melakukan suatu kegiatan (komunikasi pribadi Sudaryanti, 2006) e). Disebutkan oleh Handoko (2000) bahwa perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Menurut Moekijat (1980) dalam Tarigan (2005) menyebutkan bahwa perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.

Dahuri *et al* (2001) menyatakan bahwa Perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Perencanaan terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan yang dapat mengharmoniskan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan yang meliputi : pengumpulan dan analisis data, perencanaan, implementasi, dan kegiatan konstruksi. Gambar 3 menyajikan proses perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan.

e) Op sit halaman 3



Gambar 3. Proses perencanaan pembangunan wilayah pesisir dan lautan secara berkelanjutan.

Mahi (1999) menyatakan beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu, antara lain adalah :

- 1). Secara empiris terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar sistem di dalam kawasan pesisir itu sendiri, maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas atau laut lepas
- 2). Dalam satu kawasan pesisir terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan
- 3). Dalam satu kawasan pesisir pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok

masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda, misalnya sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, kerajinan rumah tangga dan sebagainya

- 4). Baik secara ekologis maupun ekonomis pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur sangat rentan terhadap perubahan baik perubahan internal maupun eksternal yang dapat menjurus kepada kegagalan usaha
- 5). Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama yang dimanfaatkan oleh semua orang ("open access"), padahal setiap pengguna sumberdaya akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan sehingga sangat rentan terhadap kerusakan

2.2.3. Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. wilayah pesisir pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangrove, terumbu karang, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait, tidak terdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di lahan atas maupun laut lepas. Kondisi empiris semacam ini mensyaratkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (PWPLT) harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis tersebut, yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir (Dahuri *et al.*, 2001).

Pengelolaan pesisir secara terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis dan terus menerus, dimana segala keputusan dibuat untuk penggunaan yang berkelanjutan, pembangunan dan perlindungan terhadap daerah serta sumberdaya pesisir dan laut. Mengingat bahwa suatu pengelolaan (“management”) terdiri dari tiga tahap utama : perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi maka jiwa/nuansa keterpaduan tersebut perlu diterapkan sejak tahap perencanaan sampai evaluasi (GEF/UNDP/IMO, 1996 *dalam* Dahuri, 2003).

Menurut Soemarwoto (1985) *dalam* Moesa (2002) pengelolaan lingkungan dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu :

1. Pengelolaan lingkungan secara rutin
2. Pengelolaan lingkungan secara dini (terencana)
3. Pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak
4. Pengelolaan lingkungan berdasarkan pada perkiraan dampak kegiatan

2.2.4 Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Sektorial

Perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara sektoral biasanya berkaitan dengan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumberdaya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan atau industri minyak dan gas. Pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan yang melakukan aktifitas pembangunan pada wilayah pesisir dan lautan yang sama. Selain itu, pendekatan sektoral semacam ini pada umumnya tidak atau kurang mengindahkan dampaknya terhadap yang lain, sehingga dapat mematikan sektor lain. Contohnya kegiatan industri yang membuang limbahnya ke lingkungan pesisir dapat mematikan

usaha tambak, perikanan tangkap, pariwisata pantai dan membahayakan kesehatan manusia (Dahuri *et al.*, 2001).

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir adalah pengelolaan kawasan pesisir yang bersifat sektoral. Misalnya kegiatan reklamasi pantai untuk pembangunan kawasan perumahan atau pelabuhan kadang-kadang kurang memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan. Demikian juga pembangunan kawasan wisata di daerah kawasan pesisir kadang-kadang kurang memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Anonymous, 2001).

Pendekatan sektoral yang dilakukan pada sektor kelautan sampai pada pelita VI Orde Baru, ternyata belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan itu sendiri. Bahkan banyak kebijakan sektoral, karena kurang terpadunya perencanaan menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan lingkungan. Kasus konflik antar kegiatan di pesisir terjadi karena kurangnya keterpaduan perencanaan antar wilayah dan antar sektor yang memanfaatkan sumberdaya daratan dan lautan. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya pendekatan yang digunakan tidak lagi mengandalkan pendekatan sektoral tapi juga harus menggunakan pendekatan wilayah (Budiharsono, 2005).

2.2.5 Masalah dalam Pengelolaan Pesisir

Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2004) masalah sentral dan mendasar dalam pengelolaan sumberdaya perikanan pantai adalah :

1. Kerusakan habitat ekosistem pesisir (degradasi ekosistem mangrove, kerusakan terumbu karang dan padang lamun)

2. "Over eksploitasi" sumberdaya hayati laut akibat "overfishing". Kondisi demikian berlangsung karena pengelolaan sumberdaya pesisir masih menganut rezim sumberdaya milik bersama dan bersifat terbuka
3. Tingkat beban pencemaran yang semakin tinggi, sebagai akibat berbagai kegiatan di darat "land-based pollution sources" seperti kegiatan industri, rumah tangga, dan lain-lain
4. Konflik penggunaan ruang, belum adanya aturan yang jelas tentang tata ruang dan alokasi sumberdaya untuk kawasan pesisir yang dapat dijadikan acuan oleh segenap sektor pengguna, walaupun ada masih belum ditaati secara konsisten
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) tidak hanya terbatas pada masyarakat pesisir tetapi juga pada tingkat institusi maupun tenaga ahli sebagai pembatas pengelolaan sumberdaya perikanan
6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara "stakeholders", kurangnya koordinasi antar pelaku pengelola sumberdaya terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan kawasan pesisir masih dilakukan secara sektoral
7. Lemahnya penegakan hukum bagi perusak habitat pesisir sehingga perusakan lingkungan terus berlangsung
8. Kemiskinan masyarakat pesisir, disebabkan tidak adanya konsep dan program pengembangan masyarakat pesisir sebagai subyek dan obyek pembangunan khususnya masyarakat pesisir itu sendiri.

Dahuri (2003) menyatakan ada lima alasan mendasar mengapa kehidupan di wilayah pesisir dan laut berisiko terhadap keanekaragaman hayati laut, antara lain:

- a. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan

- b. Tingkat konsumsi berlebihan dan penyebaran sumberdaya yang tidak merata
- c. Kelembagaan
- d. Kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam
- e. Kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam

2.3 Alat-alat Perencanaan

2.3.1 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal organisasi, serta analisis mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal organisasi (<http://www.goodgovemance.or.id>).

Kelebihan analisis SWOT ini diantaranya adalah hasil analisis dapat digunakan untuk memetakan posisi perusahaan terhadap lingkungannya dan menyediakan pilihan strategi umum yang sesuai, serta dijadikan dasar dalam menetapkan sasaran-sasaran organisasi selama 3–5 tahun kedepan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari para "stakeholders".

Dalam praktik sering ditemui bahwa penggunaan analisis SWOT sebagai alat perencanaan strategik tidak memberikan hasil yang diharapkan, yang diantaranya disebabkan oleh :

- 1). Data dan informasi yang digunakan kurang lengkap, kurang spesifik dan kurang akurat, sehingga dalam perumusan faktor strategisnya tidak fokus.
- 2). Visi, misi dan ukuran keberhasilan organisasi tidak ditetapkan secara jelas dan tegas atau tidak digunakan dalam mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi.

- 3). Analisis lebih ditekankan kepada kecanggihan metode dan bukan kepada filosofi, kesungguhan dalam melakukan analisis serta kegunaan hasil SWOT itu sendiri.
- 4). Terlalu beragamnya pendekatan analisis yang dikenal dan ditawarkan, tetapi relatif sedikitnya referensi dan bahan bacaan yang komprehensif dan studi kasus yang ada yang menyebabkan model dan pendekatan yang digunakan sering kurang sesuai dengan karakter organisasi yang bersangkutan.
- 5). Pemberian bobot dan peringkat diatur sedemikian rupa untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang diinginkan atau tidak digunakan dengan semestinya. Karena itu tidak jarang terjadi, sekalipun Analisis SWOT menempatkan perusahaan pada kuadran yang menghendaki perusahaan memilih strategi konsolidasi, tetapi dari sasaran-sasaran dan program yang ditetapkan perusahaan justru mencerminkan strategi ekspansi.

2.3.2 AHP ("Analytical Hierarchy Process")

Pada tahun 1971, Thomas L. Saaty berhasil mengembangkan suatu metode baru dalam menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan. Metode tersebut bernama Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP dilakukan dengan memodelkan permasalahan kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bentuk permasalahan secara bertingkat/berjenjang, kemudian memberikan penilaian secara kualitatif subyektif terhadap elemen-elemen pada setiap tingkat. Dengan pola penilaian tersebut, ketelitian hasilnya sangat ditentukan oleh relevansi dan tingkat pemahaman permasalahan dari penilai. Karena itu penilaian akan lebih berbobot jika dilakukan secara berkelompok, oleh kelompok individu yang relevan (Subiyanto, 2002).

Disebutkan dalam <http://penataanruang.pu.go.id>. bahwa kelebihan dan kelemahan dalam metode ini adalah :

Kelebihan :

- Sifatnya yang menyeluruh (tujuan dan kriterianya dapat beragam), akomodatif (mampu menampung aspirasi berbagi aktor), serta penilaiannya yang tidak saja berdasarkan angka absolut, melainkan juga relatif (menggunakan skala) membuat metode AHP terasa fleksibel, aktual dan handal untuk dapat dipakai sebagai alat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, atau untuk mengevaluasi tingkat optimasi dari alternatif yang ada.
- Kelebihan AHP adalah bisa melibatkan nilai preferensi, bisa melakukan koreksi kesalahan input.
- Cukup efektif untuk digunakan pada analisa kriteria yang cenderung kompleks.

Kekurangan :

- Cenderung agak rumit dalam proses pembobotan kriteria
- Salah satu kritis terhadap metode ini adalah kesulitan responden dalam menetapkan nilai bobot angka terhadap hubungan antar kriteria. Namun, hal ini dapat diatasi dengan beberapa teknik wawancara atau penggantian angka bobot dengan kondisi kualitas hubungan. Artinya, hubungan antar kriteria tidak dipertanyakan dalam bentuk skala angka melainkan dengan skala gradasi tingkat preferensi. Tingkat konsistensi responden juga dapat dievaluasi.

2.3.3 ZOPP (*Ziel Orientierte Projekt Planung*)

Teknik ini dikembangkan pertama kali oleh Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Jerman dalam performa metodologi *Ziel Orientierte*

Projekt Planung (ZOPP). Banyak kelompok yang memiliki kepedulian untuk penguatan kapasitas lokal menggunakan teknik ini (<http://www.perform.or.id>).

Menurut Sudaryanti (2003a) ZOPP (*Ziel Orientierte Projekt Planung*) merupakan proses perencanaan yang berorientasi kepada tujuan yang terdiri atas beberapa tahap analisis yaitu analisis partisipasi, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis alternatif. Kelebihan metode ini diantaranya adalah :

1. Memberi kesempatan “stakeholders” untuk memberikan kontribusi dalam perencanaan proyek.
2. Meningkatkan komunikasi.
3. Menjelaskan pembagian tugas.
4. Memberikan payung tujuan yang jelas.
5. Lebih efektif digunakan untuk penyelesaian masalah sumberdaya alam.

Kelemahan dari metode ini adalah jika pihak-pihak yang mewakili “stakeholders” tidak “qualified”, maka penentuan tujuan perencanaan bisa salah atau tidak tepat (komunikasi pribadi Sudaryanti, 2006) f).

Menurut Tim Perumus Hasil Lokakarya Tahapan Perencanaan Di Kabupaten Bima (2002) perencanaan partisipatif dapat didefinisikan sebagai hak yang dimiliki masyarakat untuk dapat terlibat secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupannya. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dan terlibat utuh dalam perencanaan guna menentukan arah dan agenda pembangunan sampai dengan evaluasi dari pembangunan itu sendiri.

f) Op sit halaman 3

Nilai tambah yang diharapkan sebagai implikasi dari proses perencanaan partisipatif ini adalah :

1. Efisien; partisipasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan, dimana sumber daya serta kemampuan lokal dapat dipergunakan untuk menghindari tingginya biaya penggunaan sumber daya dan kemampuan yang berasal dari luar. Selain itu, jika masyarakat dilibatkan dari awal, maka kepentingan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi pada saat perencanaan dimana perubahan dapat lebih mudah dilakukan, dibandingkan perubahan pada akhir proses yang berdampak pada penggunaan biaya, waktu dan tenaga.
2. Efektif; partisipasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan, karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi, potensi serta permasalahan, maka kebutuhan lokal pun akan lebih dapat teridentifikasi.
3. Menjalin kemitraan; partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya. Sehingga dialog dan konsesus dapat diwujudkan untuk meraih tujuan bersama
4. Meningkatkan kapasitas; partisipasi dapat meningkatkan kapasitas para pelaku, khususnya dalam proses dialog dan pengelolaan pembangunan.
5. Memperluas ruang lingkup; partisipasi dapat memperluas ruang lingkup dari kegiatan pembangunan, dimana masyarakat akan memahami tanggungjawabnya dan akan berusaha mengembangkan aktifitas pembangunan tersebut.
6. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; partisipasi akan meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi kelompok sasaran dari berbagai program pembangunan

7. Berkelanjutan; partisipasi akan mendorong berkelanjutannya berbagai aktifitas pembangunan karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan ikut serta menjaga proses maupun hasil dari pembangunan itu sendiri.

2.3.4 Masalah dalam Perencanaan

Menurut Anonymous (tidak diterbitkan) kendala/hambatan dalam perencanaan dengan peran serta masyarakat antara lain :

- Memerlukan biaya mahal
- Memerlukan waktu yang lama
- Memerlukan kecakapan khusus
- Memerlukan perubahan terus menerus
- Sangat penting memperhatikan kondisi pada saat ini dan masa lalu
- Dijadikan ajang pelampiasan ketidakpuasan masa lalu
- Keterlambatan ditanggapi dengan kecurigaan
- Perubahan yang tidak/belum diperkirakan akan menghilangkan kepercayaan
- Keengganan untuk berhubungan dengan media massa
- Perlu kehati-hatian terhadap keterbukaan dan keterwakilan yang dapat mendorong terjadinya perpecahan

Menurut Handoko (2000) ada dua jenis hambatan pengembangan rencana efektif. Pertama adalah penolakan internal para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan rencana untuk mencapainya. Dengan kata lain hambatan ini bersumber pada ketidak sediaan dan ketidak mampuan individu-individu perencana untuk melakukan kegiatan perencanaan. Hambatan kedua adalah penolakan eksternal yaitu keengganan

umum para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana karena perubahan yang ditimbulkan.

Alasan lain mengapa suatu rencana yang matang dapat mengalami kegagalan karena lembaga, individu atau kelompok masyarakat tidak mentaati segenap persyaratan dari rencana yang disepakati bersama (Dahuri *et al.*, 2001).

2.4 Partisipasi Masyarakat

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan apabila setiap masyarakat menjalankannya secara objektif dan tidak hanya mengutamakan kepentingan dirinya atau kelompok saja, maka kerugian yang akan timbul tidak akan berarti dibandingkan manfaatnya. Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses aktif, dimana masyarakat dapat mempengaruhi arah serta pelaksanaan dari pembangunan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam arti penghasilan, perkembangan pribadi, kemandirian, serta berbagai nilai yang mereka yakini (Paul 1987 dalam Tim Perumus Hasil Lokakarya Tahapan Perencanaan Di Kabupaten Bima 2002).

2.4.1 Manfaat dan Kerugian Partisipasi Masyarakat

Manfaat dan kerugian partisipasi masyarakat menurut Suratmo (1991) adalah:

1. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan, dan hubungannya, sehingga Pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak.
3. Dengan ikut aktifnya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sejak awal, biasanya perhatian dari instansi pemerintah kepada masyarakat akan meningkat.
4. Informasi yang masuk dari masyarakat bermacam-macam bentuknya, tergantung latar belakang atau minat dari masyarakat, dan sering pula informasi dan penilaiannya tidak dapat ditunjang oleh penjelasan ilmiah. Maka pengambilan keputusan menjadi makin sulit karena mengacaukan keputusan yang akan diambil
5. Informasi dan pendapat diberikan oleh anggota masyarakat yang tidak banyak tahu atau tidak dapat memahami mengenai proyek pembangunan, dampak dan pengelolaan lingkungan.

2.4.2 Cara Menyelenggarakan Partisipasi Masyarakat

Beberapa contoh cara menyelenggarakan partisipasi masyarakat menurut Suratmo (1991) antara lain:

1. Dengar pendapat, dengar pendapat ini masih dibagi lagi menjadi dua yaitu dengar pendapat terbuka dan dengar pendapat tertutup. Istilah dengar pendapat ini di luar negeri dikenal dengan nama "public hearing" tetapi umumnya istilah ini digunakan untuk dengar pendapat yang terbuka.
2. Pengumpulan pendapat tertulis dari kelompok tertentu
3. Mengumpulkan pendapat tertulis dari masyarakat umum
4. Mengumpulkan pendapat dari media massa
5. Mengumpulkan pendapat dari instansi pemerintah dan perwakilan rakyat

2.4.3 Tingkat Partisipasi

Menurut Pretty dan Hart *dalam* Murdiyanto (2004), Kategori partisipasi menjadi 7 tingkatan yang didasarkan pengamatan mereka terhadap proyek-proyek yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, yaitu :

1. Partisipasi pasif ("passive participation"). Anggota masyarakat berperan serta dengan cara diberi tahu apa yang akan terjadi atau apa yang sudah terjadi.
2. Partisipasi dalam pemberian informasi ("participation in information giving"). Anggota masyarakat berperan serta dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti yang menggunakan daftar pertanyaan.
3. Partisipasi melalui konsultasi ("participation by consultation"). Anggota masyarakat berperan serta dengan menanyakan pendapatnya, kemudian pihak luar mendengarkannya.
4. Partisipasi untuk insentif-insentif material ("participation for material incentive"). Anggota masyarakat berperan serta dengan menyediakan sumberdaya, misalnya tenaga sebagai imbalan untuk mendapatkan makanan, uang atau insentif-insentif material lainnya.
5. Partisipasi fungsional ("functional participation"). Anggota masyarakat berperan serta dengan membentuk kelompok-kelompok yang diprakarsai oleh pihak luar untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh proyek.
6. Partisipasi interaktif ("interactive participation"). Anggota masyarakat berperan secara aktif, analisis-analisis dibuat bersama-sama untuk menyusun suatu rencana aksi serta pembentukan kelompok-kelompok baru atau penguatan kelompok-kelompok baru yang sudah ada.

7. Mobilisasi mandiri ("self mobilisation"). Anggota masyarakat berperan serta dengan mengambil inisiatif untuk mengubah sistem yang tidak tergantung kepada pihak luar.

2.5 Pengendalian Pencemaran

2.5.1 Pengertian Pencemaran Laut

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19/1999, pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Hal ini berarti bahwa perlu ditetapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan talah terjadinya pencemaran laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut karena sangat erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri (Anonymous, 2002).

Konvensi Hukum Laut III memberikan pengertian bahwa pencemaran laut adalah perubahan dalam lingkungan laut termasuk muara sungai yang menimbulkan akibat yang buruk sehingga dapat merugikan terhadap sumber daya laut hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk kegiatan perikanan dan penggunaan laut secara wajar, memerosotkan kualitas air laut dan menurunkan mutu kegunaan dan manfaatnya (Siahaan, 1989 *dalam* Misran, 2006).

2.5.2 Bahan Pencemar

Sebagian besar bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan. Pada umumnya bahan pencemar tersebut berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian dan rumah tangga. Sedangkan jenis bahan pencemar

utamanya terdiri dari sedimen, unsur hara, logam beracun, pestisida, organisme patogen, bahan-bahan yang menyebabkan oksigen terlarut dalam air berkurang (Dahuri, 2003).

Menurut Darmono (2001) bahan buangan yang dibuang ke laut berasal dari bahan kerukan pelabuhan yang mendangkal, sungai yang mendangkal dan sebagainya. Biasanya dua pertiga dari bahan tersebut berupa bahan yang terkontaminasi oleh bahan toksik buangan dari limbah industri dan rumah tangga serta pertanian. Diperkirakan 20% dari limbah yang dibuang ke laut ialah limbah industri berupa lumpur lunak "sludge" lumpur yang bercampur dengan bahan kimia toksik, agen infeksi, dan bahan padat yang berasal dari endapan pengolahan limbah.

2.5.3 Sumber Pencemaran

Menurut Alamsyah (1999) *dalam* Misran (2006) pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan atau aktivitas di daratan ("land-based pollution") maupun kegiatan atau aktivitas di lautan ("sea-based pollution"). Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi secara fisik dan kimiawi.

Kristanto (2002) menggolongkan sumber pencemar menjadi dua yaitu :

1. Sumber domestik (rumah tangga) yaitu perkampungan, kota, pasar, jalan, terminal, rumah sakit, dan sebagainya. Limbah domestik adalah semua limbah yang berasal dari kamar mandi, WC, dapur, tempat cuci pakaian, apotik, rumah sakit, dan sebagainya yang secara kuantitatif limbah tadi terdiri atas zat organik, baik padat ataupun cair, bahan berbahaya dan beracun (B3), garam terlarut, lemak dan bakteri.
2. Sumber non-domestik, yaitu dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, dan sumber lainnya. Limbah non-domestik sangat bervariasi, lebih-

lebih untuk limbah industri. Limbah pertanian biasanya terdiri atas bahan padat bekas tanaman yang bersifat organik, pestisida, bahan pupuk yang mengandung nitrogen, dan sebagainya.

Dijelaskan oleh Sutardjo bahwa kegiatan dan sumber pencemar yang menjadi obyek pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan adalah :

- Berbagai kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap sumberdaya ikan dan lingkungan perairan dan menimbulkan pencemaran perairan
- Limbah B3 yang berasal dari kegiatan pabrik/industri dan kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) yang menghasilkan limbah B3 (Hg, Cd, CN)
- "Land Base Pollution" : limbah rumah tangga, industri, rumah sakit, limbah pertanian, peternakan dan kehutanan
- Limbah kegiatan perikanan : limbah pabrik pengolahan/pemgalengan ikan, limbah kegiatan budidaya perikanan/budidaya ikan jaring apung
- Limbah minyak (tumpahan minyak dari tangker, ceceran minyak dari kapal, bocoran saluran pipa).

2.5.4 Dampak Pencemaran Laut

Beberapa jenis dampak lanjutan sebagai akibat pencemaran yang terjadi di perairan pesisir dan lautan diantaranya adalah persoalan sedimentasi, eutrofikasi, *anoxia*, kesehatan umum dan perikanan (Dahuri, 2003).

Masalah pencemaran yang dikaitkan dengan pertanian adalah sedimentasi pestisida dan pupuk. Dalam konsentrasi yang rendah (karena sudah terencerkan), pestisida biasanya memang tidak sampai mematikan ikan, tetapi menghambat pertumbuhan. Tetapi untuk beberapa organisme laut, terutama jenis *Crustacean* seperti

udang dan kepiting, senyawa-senyawa organoklorin dan organofosfat telah bersifat letal sekalipun dalam dosis rendah (Darmono, 2001).

Unsur logam berat masuk ke lingkungan laut melalui sungai dan udara, umumnya sebagian besar masuk melalui aliran sungai, hanya unsur-unsur yang menguap saja yang banyak dibawa oleh udara seperti merkuri dan selenium. Dampak pencemaran akibat logam-logam berat adalah dikarenakan sifatnya yang tak dapat terurai dan mudah diabsorpsi oleh biota laut sehingga terakumulasi dalam tubuh. Selain mengganggu ekosistem, unsur logam berat secara tidak langsung juga merusak perikanan dan kesehatan manusia (Misran, 2006).

Menurut Wijanto (2006) dampak yang ditimbulkan akibat keracunan oleh logam berat antara lain :

- Akibat keracunan akut karena merkuri pada manusia antara lain mual, muntah-muntah, diare berdarah, kerusakan ginjal serta dapat mengakibatkan kematian. Keracunan kronis ditandai dengan peradangan mulut dan gusi, pembengkakan kelenjar ludah dan mengeluarkan ludah secara berlebihan. Tanda-tanda keracunan pada manusia terjadi apabila kadar metal merkuri dalam darah adalah $0,2 \mu\text{g}$.
- Keracunan akut karena timbal akan mengakibatkan terbakarnya mulut, keracunan kronis menyebabkan anemia, mual, sakit di sekitar perut, serta mengakibatkan kelumpuhan. Konsentrasi timbal $0,05 \text{ mg/l}$ dapat menimbulkan bahaya pada lingkungan laut.
- Dampak dari konsumsi tembaga dalam konsentrasi besar pada manusia adalah kerusakan pada ginjal. Sementara pada biota laut, tembaga bersifat racun bahkan lethal (tergantung konsentrasinya) untuk jenis algae dan molusca.

Menurut Wardhana (1995) lapisan minyak di permukaan air lingkungan akan mengganggu kehidupan organisme di dalam air. Hal ini disebabkan karena :

- a. Lapisan minyak pada permukaan air akan menghalangi difusi oksigen dari udara ke dalam air sehingga jumlah oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang. Kandungan oksigen yang menurun akan mengganggu kehidupan hewan air.
- b. Adanya lapisan minyak pada permukaan air juga akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam air sehingga fotosintesis oleh tanaman air tidak dapat berlangsung. Akibatnya oksigen yang seharusnya dihasilkan pada proses fotosintesis tidak terjadi. Kandungan oksigen dalam air semakin menurun.
- c. Tidak hanya hewan air saja yang terganggu akibat adanya lapisan minyak pada permukaan air tersebut tapi burungpun ikut terganggu karena bulunya jadi lengket, tidak mengembang lagi akibat terkena minyak.

2.5.5 Usaha Pengendalian Pencemaran Laut

Menurut Sudaryanti (2002) metode pengendalian pencemaran laut adalah sebagai berikut :

- Teknik pemantauan

Teknik pemantauan pencemaran laut dapat dilakukan dengan :

- » Pendekatan fisika kimia yaitu dengan cara pengukuran langsung terhadap konsentrasi polutan
- » Pendekatan biologis baik dengan teknik *bioassessment* maupun *bioassay*

- Teknik pemulihan

Metode pemulihan perairan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- » Metode preventif : melalui pembinaan dan peningkatan pengawasan dan perlindungan hukum. Di Belanda, salah satu upaya pencegahan pencemaran perairan dengan sistem "the polluters pays" (Laane dan Lingaard-Jorgensen, 1992 *dalam* Sudaryanti, 2002).

- » Metode kuratif

Metode kuratif dapat dilakukan dengan :

- » Pendekatan teknik fisika misalnya sistem aerasi yang diterapkan di tambak
- » Pendekatan biologis misalnya dengan melakukan penanaman mangrove di pematang atau di tengah tambak, dan di pesisir. Selain itu dapat dilakukan bioremediasi adalah pemanfaatan mikroorganisme hidup untuk mengurangi sampah atau bahan pencemar untuk mengurangi kadar toksik (Romomohtarto dan Juwana, 1999 *dalam* Sudaryanti, 2002).

3. METODOLOGI

3.1 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai proses perencanaan pengelolaan kawasan pesisir Muncar. Bahan-bahan perencanaan yang digunakan adalah profil kelembagaan, potensi sumberdaya pesisir Muncar, ekologi pesisir, sumberdaya manusia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pesisir Muncar.

3.2 Metode Penelitian

Penentuan metode ilmiah diperlukan untuk membatasi teknik dan prosedur penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian evaluasi dengan metode survai. Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) bahwa penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Pada dasarnya penelitian ini berusaha mendeskripsikan proses perencanaan pengelolaan pesisir, pengetahuan masyarakat serta bentuk partisipasi "stakeholders" dalam perencanaan pengelolaan pesisir dan laut di Muncar

3.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian terdiri tahap pendahuluan dan tahap pelaksanaan di lapang. Tahap pendahuluan merupakan kegiatan observasi mengenai kondisi pencemaran di Muncar dan kegiatan mengurus surat izin penelitian melalui Dinas Bakesbanglinmas Kabupaten Banyuwangi. Observasi dilakukan di desa Kedungrejo karena di lokasi inilah Sungai Kalimati dan Sungai Tratas bermuara ke laut. Selanjutnya tahap penelitian meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para "stakeholders" dan

pengambilan data sekunder melalui teknik dokumentasi. Pelaksanaan di lapang dilakukan selama 23 hari dengan waktu penelitian yang tidak terus menerus setiap hari, dimana hanya diambil hari-hari tertentu dalam melakukan wawancara untuk pengambilan data. Untuk lebih jelasnya tahapan pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.4 Data

3.4.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat (Marzuki, 1989). Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan "stakeholders" dan observasi di lapang. Jenis data primer yang diambil meliputi keterlibatan "stakeholders" yang dilihat dari partisipasi berbagai instansi (BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, DKP, Disperindag, Dinas Kimpraswil, Dinas Pengairan, Dinas Kecamatan Muncar) dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah perencanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Muncar, seperti masyarakat pesisir (nelayan dan pembudidaya), pengusaha/pengguna sumberdaya, LSM, tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan wilayah pesisir dalam berbagai pertemuan formal maupun informal mulai dari awal perencanaan sampai pengambilan keputusan.

b. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri, pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari buku, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 1989).

Data sekunder yang diambil meliputi :

- Keadaan umum daerah penelitian
- Letak geografis daerah penelitian
- Keadaan penduduk pesisir muncar
- Kondisi sanitasi lingkungan
- Data rencana dan pengembangan wilayah yang meliputi strategi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Muncar

Data sekunder dapat diperoleh dari :

- BAPPEDA (Badan Perencanaan Daerah)
- Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi
- Kantor Dinas Kecamatan Muncar
- Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

1). Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survai. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung pada responden (Singarimbun dan Effendi, 1995). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti memakai daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai alat bantu. Data

wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data partisipasi dan penentuan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam perencanaan pengelolaan pesisir di Muncar menurut para "stakeholders". Sedangkan wawancara bebas merupakan wawancara yang tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan.

2). Observasi

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera (Marzuki, 1989). Observasi dilakukan untuk memperoleh data seperti : deskripsi geografis kecamatan Muncar, kegiatan masyarakat di kawasan pesisir Muncar, kondisi lingkungan Muncar terutama di kawasan pengolahan hasil perikanan, jenis ekologis pesisir yang terkena dampak dari limbah industri.

3). Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku/surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998). Teknik ini bertujuan untuk mengabadikan sumber data yang dianggap dapat menunjang penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ke instansi-instansi yang terkait dengan perencanaan pengelolaan pesisir Muncar, yaitu : BAPPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kabupaten Banyuwangi, kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, kantor Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi dan kantor Dinas Kecamatan Muncar. Daftar dokumen yang diperoleh dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar dokumen yang diperoleh dalam penelitian

No	Sumber	Dokumen
1	Kantor kecamatan Muncar	- Dokumen keadaan penduduk Kecamatan Muncar
2	BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi	- Catatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) - Catatan Konsepsi Program Dasar Perencanaan Pembangunan - Catatan Sisitem Perencanaan Pembangunan - Dokumen Penataan Ruang Kawasan Muncar
3	Dinas Perikanan dan Kelautan	- Dokumen <i>Resource and ecological Assessment</i> (REA) tahap II tahun 2004 - Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Dan Kelautan Tahun 2006-2010
4	Dinas Kimpraswil	- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banyuwangi tahun 2005 - Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTRK) Muncar tahun 1991/1992-2013/2014
5	Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	- Foto kondisi lingkungan Muncar yang tercemar - Catatan kondisi lingkungan Muncar

3.4.3 Teknik Penentuan Responden

Teknik yang digunakan dalam penentuan responden pada penelitian ini adalah "snowball sampling technique", yang menjadi sampel adalah sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan saja. Responden yang ditunjuk sebagai sampel menunjukkan pada peneliti orang-orang lainnya untuk dijadikan responden yang relevan guna mendapatkan data, demikian seterusnya, sehingga sampel bertambah terus. Untuk mendapatkan data tertentu sampel dapat diteruskan sampai mencapai taraf "redundancy", yaitu dengan menggunakan sampel baru lainnya ternyata tidak

menambah informasi baru yang bermakna (Usman dan Akbar, 1996 *dalam* Muzdalifah, 2003).

Kelemahan teknik ini adalah subjektivitas yang tinggi sehingga untuk mengatasinya dikombinasikan dengan "stakeholders". Selanjutnya responden yang dipilih harus memenuhi "stakeholders" yang ada meliputi semua pihak baik instansi maupun masyarakat yang terkait dalam proses perencanaan pengelolaan kawasan pesisir Muncar yaitu : instansi (BAPPEDA, DKP, Disperindag, Bagian Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dinas Kimpraswil, Dinas Pengairan, dan Dinas Kecamatan Muncar), tokoh masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan organisasi masyarakat.

Dasar pemikiran yang digunakan peneliti dalam menentukan responden adalah berdasarkan pengaruh dan tingkat pengetahuan responden terhadap perencanaan pengelolaan pesisir Muncar. Daftar responden dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar responden

No.	Responden	Nama	Jumlah (orang)	Persentase (%)
	Instansi Pemerintah			
1.	BAPPEDA	Tjatur, Luthfi, widodo	3	20
2.	Disperindag	Kusdi, Sudjiran	2	13,33
3.	Diskanla	Soebandiyono	1	6,67
4.	Dinas Kimpraswil	Reza	1	6,67
5.	Dinas Pengairan	Selamet Ariyanto	1	6,67
6.	Bagian Lingkungan Hidup	Tri Joko	1	6,67
7.	Dinas Kecamatan Muncar	Mudjilah	1	6,67
	Masyarakat			
8.	Pengusaha	Thamrin	1	6,67
9.	Tokoh masyarakat	Selamet B.G	1	6,67
10.	LSM 'Akar Pala'	Arifin	1	6,67
11.	Organisasi Masyarakat	Zainullah Baijuri	1	6,67
13.	Nelayan pembudidaya ikan	Mastur	1	6,67
	Jumlah		15	100

Berdasarkan analisis “stakeholders” yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, peneliti mendapatkan 15 responden yang terdiri dari dinas/instansi yang terkait dengan perencanaan pengelolaan potensi sumberdaya di wilayah Muncar antara lain BAPPEDA Banyuwangi sebanyak 3 orang (20%) sebagai badan yang mengkoordinasikan perencanaan daerah sehingga lebih mengetahui proses perencanaan yang dijalankan di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 orang (13,33%) terkait dengan masalah pengelolaan industri terpadu di Muncar, Dinas perikanan dan kelautan yang mengelola sumberdaya perikanan di perairan Muncar 1 orang (6,67%), Dinas Kimpraswil terkait dengan tata ruang wilayah serta pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir 1 orang (6,67%), Dinas Pengairan 1 orang (6,67%) terkait dengan masalah penyediaan air bersih di Muncar dan pengembangan budidaya ikan sistem kolam air deras di perairan umum, bagian lingkungan hidup Kabupaten Banyuwangi 1 orang (6,67%) terkait dengan kondisi lingkungan di Muncar, dan Dinas Kecamatan Muncar sebagai lembaga legislatif yang berperan dalam pembangunan di Muncar.

Responden dari masyarakat Muncar antara lain tokoh masyarakat nelayan yaitu orang yang dihormati sekaligus dipercaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus pembudidaya keramba jarring apung (KJA) 1 orang (6,67%), LSM sekaligus sebagai nelayan 1 orang (6,67%), ketua organisasi masyarakat kelompok Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas (PSBK) yang juga sebagai juragan nelayan 1 orang, nelayan pembudidaya ikan 1 orang (6,67%) dan pengusaha yang bergerak di bidang industri pengalengan ikan di Muncar sebanyak 1 orang (6,67%).

3.5 Analisis Data

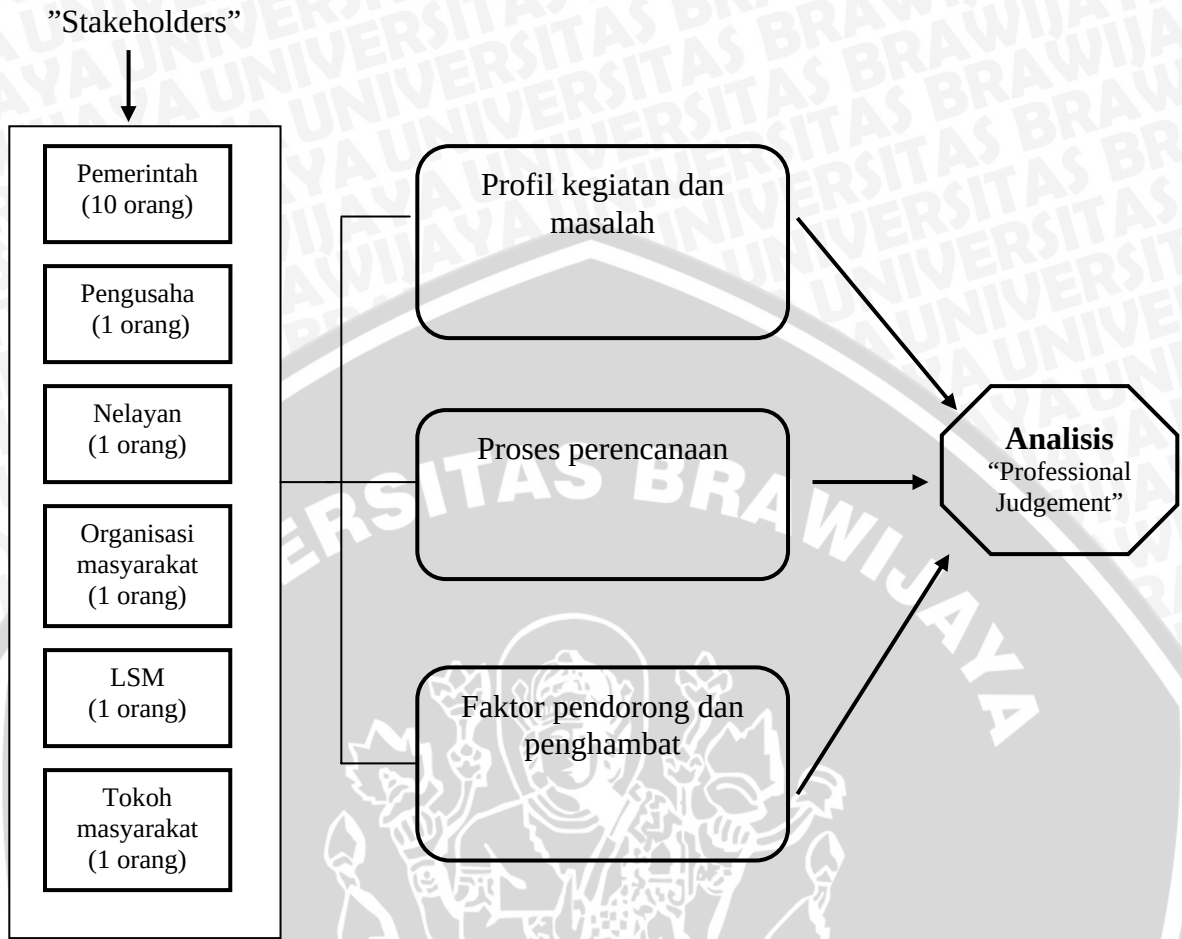
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Dalam penelitian ini, mencoba memberikan gambaran dan penjelasan dari fenomena yang ada, yaitu profil kegiatan dan masalah dalam perencanaan pengelolaan pesisir Muncar, peran para "stakeholders" berkaitan dengan proses perencanaan pengelolaan pesisir di Muncar yang selama ini dilakukan dan bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pengelolaan pesisir Muncar selama ini.

Dalam mencapai tujuan penelitian ada beberapa hal yang perlu dianalisis yaitu :

1. Melakukan analisis dokumen REA II dan dokumen penataan ruang kawasan Muncar untuk memperoleh profil kegiatan dan masalah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Muncar
2. Melakukan analisis hasil wawancara mengenai proses perencanaan dan didukung dengan dokumen pedoman Musrenbangda
3. Menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dan peran pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan pengelolaan pesisir

Data yang diperoleh dari semua responden selama penelitian dianalisis secara deskriptif naratif dengan komparasi metode ZOPP dengan menggunakan "professional judgement" yaitu suatu penilaian berdasarkan keilmuan (komunikasi pribadi Sudaryanti, 2007) g). Skema analisis hasil dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Bagan analisis hasil

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Topografi

Secara geografis letak kota Muncar berada pada koordinat $7^{\circ}31' - 8^{\circ}46'$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}53' - 114^{\circ}38'$ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Rogojampi
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tegaldelimo
- Sebelah Barat : Kecamatan Srono

Kecamatan Muncar merupakan kawasan pesisir Kabupaten Banyuwangi, tepatnya terletak pada bagian tenggara dari kota Banyuwangi. Luas kecamatan Muncar ± 7.934 ha, yang terbagi menjadi sepuluh Desa. Dari sepuluh desa kegiatan perikanan banyak berkonsentrasi pada desa Kedungrejo, Tembakrejo dan Kedungringin.

Muncar merupakan wilayah dataran rendah (0-37 dpl) yang subur yang hampir 50% dari lahan wilayah kecamatan ini digunakan untuk pertanian lahan sawah. Topografi wilayah muncar sedikit miring kearah barat laut ke tenggara dan mempunyai jenis tanah endapan alluvial. Berdasarkan keadaan tersebut maka keadaan air tanahnya termasuk dangkal. Pada musim hujan permukaan air tanah naik (dangkal), sedangkan pada musim kemarau permukaan air tanahnya turun (dalam). Disamping itu Kota Muncar dilewati oleh sungai Kalimati dan sungai Tratas. Peta wilayah Muncar dapat dilihat pada Lampiran 4 (Sumber : dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Muncar tahun 1991/1992-2013/2014).

4.1.2 Kondisi Masyarakat

4.1.2.1 Penduduk menurut umur

Penduduk wilayah Muncar tergolong padat dengan jumlah ± 125.692 jiwa yang terdiri dari 63.173 jiwa laki-laki dan 62.519 jiwa perempuan dengan rata-rata setiap keluarga terdiri dari ± 4 jiwa. Jumlah penduduk menurut golongan usia dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah penduduk kecamatan Muncar menurut golongan usia tahun 2006

No.	Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0 - 4 th	5.164	4,10
2	5 - 9 th	9.251	7,36
3	10 - 14 th	12.185	9,69
4	15 - 19 th	11.491	9,14
5	20 - 24 th	14.394	11,45
6	25 - 29 th	11.825	9,41
7	30 - 34 th	11.769	9,36
8	35 - 39 th	12.338	9,81
9	40 - 44 th	11.213	8,92
10	45 - 49 th	9.709	7,72
11	50 - 54 th	8.355	6,64
12	Di atas 55 th	7.998	6,36
	Jumlah	125.692	100

Sumber : Laporan kependudukan bulan Desember 2006 Kecamatan Muncar.

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa penduduk Muncar yang berusia 20-24 tahun menduduki jumlah yang paling banyak yaitu sebesar 11,45% atau 14,394 jiwa. Penduduk yang tergolong usia produktif yaitu umur 16-50 tahun sebanyak 82.739 jiwa atau 65,82% lebih dari setengah penduduk Muncar, sehingga dengan banyaknya usia produktif akan memberikan kontribusi pemikiran pada setiap perencanaan pengelolaan dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan hasil perencanaan yang menyangkut wilayah pesisir.

4.1.2.2 Penduduk menurut pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Muncar telah tersedia mulai dari tingkat dasar sampai ketingkat lanjutan atas. Sarana pendidikan di Kecamatan Muncar sudah cukup memadai sehingga tidak menghambat penduduk Muncar untuk menuntut ilmu. Jumlah penduduk Kecamatan Muncar menurut pendidikan tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel

4.

Tabel 4. Jumlah penduduk kecamatan Muncar menurut pendidikan tahun 2006

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tidak Tamat SD/ sederajat	8.020	7,36
2.	Tamat SD/ sederajat	44.825	41,14
3.	Tamat SLTP/ sederajat	28.184	25,87
4.	Tamat SLTA/ sederajat	25.048	22,99
5.	Tamat Akademi (D ₁ , D ₂ dan D ₃)	1.923	1,76
6.	Sarjana	938	0,86
7.	Lain-lain	17.024	13,51
	Jumlah	125.692	100

Sumber : Laporan kependudukan bulan Desember Kecamatan Muncar 2006.

Data Tabel 4 menunjukkan tingkat pendidikan di Muncar masih rendah karena paling banyak masyarakatnya adalah tamat SD/ sederajat sebesar 41,14% pada umumnya masyarakatnya sudah bisa membaca dan menulis tetapi pola pikirnya masih sederhana atau pragmatis. Persentase yang paling sedikit adalah penduduk yang tamat perguruan tinggi sebesar 0,86% dari jumlah keseluruhan penduduk Muncar. Mereka ini yang mempunyai pemikiran yang mendalam dalam menghadapi suatu masalah dan berani untuk menghadapi perubahan untuk kemajuan bersama.

4.1.2.3 Jenis mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian penduduk Muncar sangat beragam antara lain petani, peternakan, nelayan, jasa, industri, PNS dan swasta. Karakteristik mata pencaharian

penduduk disebabkan karena letak geografis garis pantai, yakni antara lingkungan daratan dan lautan sehingga hidup mereka sangat tergantung pada kedua wilayah ini. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah angkatan kerja h) kecamatan Muncar yang bekerja menurut sektor lapangan usaha bulan Desember 2006.

No.	Jenis Mata Pencanharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan	35.681	62,91
2.	Pertambangan dan penggalian	12	0,02
3.	Industri pengolahan	6.407	11,41
4.	Listrik, gas dan air	42	0,07
5.	Bangunan	1.052	1,85
6.	Perdagangan besar, eceran dan rumah makan serta hotel	8.575	15,12
7.	Angkutan, pergudangan dan komunikasi	898	1,58
8.	Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan tanah dan jasa perusahaan	610	1,07
9.	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	3.372	5,95
	Jumlah	56.712	100

Sumber : Laporan kependudukan bulan Desember 2006 Kecamatan Muncar.

Dari Tabel 5 dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Muncar yang terbanyak adalah pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan yaitu sebanyak 35.681 orang atau 62,91% dari jumlah keseluruhan angkatan kerja penduduk Muncar. Dari jumlah total penduduk wilayah Muncar tersebut yang berprofesi sebagai nelayan mencapai 11.958 jiwa yang terdiri dari 1.028 jiwa juragan dan 10.930 jiwa pendega. Secara garis besar kegiatan penduduk di wilayah Muncar merupakan nelayan atau kegiatan lain yang terkait dengan perikanan terutama adalah kegiatan pengawetan dan pengolahan ikan.

h) angkatan kerja : penduduk usia kerja (18 th ke atas) yang bekerja dan mencari kerja (tidak termasuk anak-anak dan ibu rumah tangga)

4.1.3 Struktur Kelembagaan

Kabupaten Banyuwangi menggunakan model jaringan kerja dalam mengelola wilayah pesisir. Instansi/sector yang berwenang dalam pengelolaan kawasan pesisir adalah Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) akan tetapi koordinasi antar sector dibangun melalui jaringan dari perundang-undangan dan kebijakan yang ada. Meskipun kebijakan penataan ruang kawasan pesisir belum diatur secara legal melalui peraturan daerah, akan tetapi wacana kebijakan penataan ruang wilayah pesisir telah secara intensif digulirkan oleh Bappeda sebagai badan perencana di daerah. Komite Konsultasi Pengelolaan Perikanan Kabupaten atau disingkat KKPPK merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah seiring dengan adanya proyek bantuan luar negeri yang dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB) yaitu Coastal Community Development And Fisheries Resource Management Project (COFISH).

Terdapat organisasi kelompok Pengelolaan Sumberdaya perikanan Berbasis Komunitas (kelompok PSBK) di Muncar dengan nama "Sentosa Lestari". Kelompok ini telah membuat rencana kerja masyarakatnya masing-masing menyangkut berbagai kegiatan seperti rencana rehabilitasi hutan bakau, pengelolaan kebersihan lingkungan, pelestarian habitat dengan pengelolaan suaka ikan, pengaturan wilayah penangkapan ikan, penyelesaian kelompok antar nelayan dan lain sebagainya.

4.1.4 Keadaan Umum Kondisi Pesisir Muncar

Muncar memiliki sumberdaya perikanan yang cukup melimpah dan mampu memberikan kehidupan bagi masyarakat wilayah tersebut. Hasil tangkapan yang dominan adalah jenis ikan lemuru yang memberi kontribusi sekitar $\pm 74,5\%$ dari total ikan hasil tangkapan yang didaratkan di daerah Muncar. Jika dilihat dari jenis dan

komposisi hasil tangkapannya Muncar mempunyai karakteristik untuk perikanan pelagis kecil, seperti jenis lemuru dan layang (Sumber : dokumen *Resource and Ecological Assessment* (REA) tahap II tahun 2004).

Luas perairan Selat Bali merupakan daerah penangkapan nelayan Muncar mencapai ± 250.000 ha. Perairan teluk Pangpang mempunyai kedalaman antara 11-18 meter, serta wilayah Kayu Aking berkedalaman antara 11-52 meter. Panjang total garis pantai dalam wilayah Kecamatan mencapai ± 13 km. Garis pantai sepanjang 6-7 km pada wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk reboisasi sempadan pantai. Jenis sumberdaya habitat yang diidentifikasi pada daerah pantai adalah : hutan mangrove, terumbu karang, tambak, muara sungai, daerah pemukiman dan industri perikanan. Keseluruhan habitat pantai tersebut secara nyata akan saling terkait terhadap produksi perikanan di wilayah Muncar (Sumber : dokumen *Resource and Ecological Assessment* (REA) tahap II tahun 2004).

Kondisi sumberdaya pesisir Muncar adalah sebagai berikut :

a. Mangrove

Hutan mangrove merupakan tipe hutan khas tropika yang tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai. Arti penting hutan mangrove adalah sebagai sumber makanan bagi berbagai macam hewan laut. Sistem perakaran yang kokoh akan melindungi pantai dari erosi, gelombang angin dan ombak. Hutan mangrove juga merupakan daerah asuhan dan pemijahan bagi ikan, udang dan kerang-kerangan.

Daerah hutan mangrove ditemukan disepanjang dusun Tratas, Kabatmantren, Krajan sampai Tegalpare (Desa Wringin Putih). Luas total dari kawasan mangrove tersebut diestimasi mencapai ± 600 ha. Secara umum kondisi hutan mangrove alami di dusun Tratas dalam kondisi kurang baik karena banyak areal mangrove yang terkonversi

menjadi areal pertambahan udang. Mangrove yang ditanam maupun yang sudah ada (alami) tersebut dilindungi oleh Pemerintah. Kesadaran tersebut menyebabkan sejak tahun 2000 mulai tidak ada penebangan bakau tidak seperti sebelum tahun 2000. masalah yang kini muncul adanya orang yang menangkap ikan dengan memakai obat/racun di sungai-sungai yang bermuara di Teluk Pangpang, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi hasil tangkapan dan kualitas tanah akan turun.

Dampak kegiatan rehabilitasi mangrove tahun 1999-2004 di Desa Wringin Putih paling dirasakan oleh masyarakat pinggir pantai yang dekat dengan hutan mangrove. Salah satunya karena banyaknya kepiting bakau di hutan mangrove yang dapat menambah penghasilan masyarakat setempat. Tapi kondisi air yang tercemar dari limbah minyak ikan lemuru Muncar menyebabkan perairan kawasan berbusa coklat dan baunya tidak enak apalagi musim hujan (Sumber : dokumen *Resource and Ecological Assessment* (REA) tahap II tahun 2004).

b. Terumbu Karang

Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki nilai estetika alam yang sangat tinggi. Terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung ekosistem pesisir dan laut dari tekanan gelombang. Keberadaan terumbu karang sangat ditentukan oleh kondisi kecerahan perairan, temperatur, salinitas, kecepatan arus air, sirkulasi dan sedimentasi.

Kondisi terumbu karang di Muncar sudah rusak cukup lama setelah tahun 2000. bantuan COFISH untuk terumbu karang buatan cukup memperbaiki kondisi terumbu karang yang ada walaupun tidak sebagus dulu. Untuk jenis terumbu karang bernilai jual tinggi dapat dikatakan sudah tidak ada lagi karena habis diambil oleh nelayan pencari terumbu karang.

Lokasi terumbu karang buatan dan alami yang tergolong masih agak bagus hanya di Tanjung Kayu Aking saja, itupun untuk jenis terumbu karang yang bernilai ekonomis penting sudah habis.

c. Kawasan laut lindung ("Fish Sanctuary")

Kawasan laut lindung secara umum adalah perlindungan kawasan upaya konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan dalam suatu lokasi wilayah dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, secara sederhana Kawasan laut lindung adalah lokasi yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat untuk kepentingan konservasi.

Daerah Kawasan perlindungan laut terletak di Tanjung Kayu Aking dengan luas mencapai 240 Ha dan panjang 6 km. Pada wilayah ini merupakan daerah penangkapan ikan dengan memakai bubu, pancing dan bagan. Dalam penataan dan pengelolaannya Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan terbitnya PERDA no.35 tahun 2003 tentang Penetapan, Pelestarian Dan Pengelolaan Kawasan Laut Lindung Perairan Kayu Aking di Muncar.

d. Perikanan Tangkap

Perairan Selat Bali merupakan daerah penangkapan "fishing ground" utama bagi hampir 90% nelayan Kabupaten Banyuwangi terutama yang berdomisili di Muncar

Pada saat sekarang kondisi perairan Selat Bali mengalami beban-beban yang cukup berat diantaranya beban tangkap berlebih. Data terakhir berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh institusi lokal maupun dunia (misalnya FAO) menunjukkan adanya gejala "overfishing" disebabkan adanya penambahan atau pengembangan alat tangkap dan nelayan andon, beban pencemaran limbah industri maupun rumah tangga, beban penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (potasium dan sianida)

serta beban kerusakan hutan mangrove. Akibatnya ketersediaan sumberdaya ikan (SDI) perairan Selat Bali semakin menurun sebagaimana data yang tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2001 – 2005

No	Tahun	Jumlah Unit Tangkap	Produksi (ton)
1	2001	6649	35.831,4
2	2002	6800	36.906,35
3	2003	5986	36.991,21
4	2004	5785	27.500,92
5	2005	5790	18.982,61

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan hasil tangkapan pada lima tahun terakhir mulai 2001-2005 rata-rata mencapai 13,35 %. Sementara penurunan cukup tajam terjadi dari tahun 2003 ke 2004 sebesar 25,65 % dan dari tahun 2004 ke 2005 sebesar 30,97 %.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dibutuhkan kebersamaan dari semua unsur terkait untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya perikanan secara lestari dan berkesinambungan.

e. Perikanan Budidaya

Untuk perikanan budidaya jenis-jenis komoditas prospektif yang dapat dikembangkan antara lain keramba jaring apung dengan jenis komoditas kerapu. Kegiatan budidaya dengan keramba jaring apung berlokasi di Teluk Pangpang. Dari potensi lestari yang ada yaitu sebesar 1.500 unit baru dimanfaatkan sebesar 12 unit (1%). Dapat dilihat bahwa pemanfaatan budidaya laut masih jauh di bawah potensi yang ada,

sehingga peluang pengembangan budidaya laut masih sangat besar bagi masyarakat Muncar. Diharapkan pengembangan budidaya laut dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Perikanan Darat

Budidaya perikanan darat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai alternatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut diantaranya budidaya air payau dan perikanan tangkap air tawar. Kegiatan budidaya air payau (tambak) dilakukan di area seluas 3.000 ha dengan potensi lestari 2.279 ha dan dimanfaatkan seluas 1.161 ha. Untuk penangkapan ikan di sungai dengan potensi lestari 73,5 km belum diketahui tingkat pemanfaatannya.

g. Industri Pengolahan

Produksi perikanan tangkap dan budidaya yang dihasilkan oleh nelayan dan pembudidaya ikan di kabupaten Banyuwangi, hampir 90 % dipasarkan di Muncar sebagai bahan baku industri pengalengan, penepungan, cold storage, pemindangan dan pengasinan. Hanya sebagian kecil yang dipasarkan untuk konsumsi masyarakat dalam bentuk ikan segar. Sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Daftar perusahaan pengolahan perikanan di Muncar

No	Jenis Usaha	Jumlah (unit)	Kapasitas Terpasang/Hari	Produksi/Hari/ Perusahaan
1	Pengalengan Ikan	12	100-150 ton	5-15 ton
2	Cold Storage	23	50-100 ton	5-10 ton
3	Tepung Ikan Mekanik	35	100-200 ton	10-15 ton
4	Minyak Ikan	13	5.000-10.000 liter	500-1500 liter
5	Pemindangan	28	3-5 ton	1-1.5 ton
6	Pengasinan	9	1-3 ton	0.5-1 ton
7	Peng Es-an Ikan	12	-	1.2 ton
8	Petis	1	1-2 kwintal	0.5-1 kwintal
9	Terasi	36	1-2 kwintal	0.5-1 kwintal
10	Tepung Ikan Skala Kecil	12	1-3 ton	1-2 ton

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi

4.2 Profil dan Karakter Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah semua pihak baik instansi maupun masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan kawasan pesisir Muncar yaitu : instansi (BAPPEDA, DKP, Disperindag, Bagian Lingkungan Hidup Banyuwangi, Dinas Kimpraswil, Dinas Pengairan, dan Dinas Kecamatan Muncar), tokoh masyarakat, nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha dan organisasi masyarakat.

Karakteristik responden berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Karakteristik responden berdasarkan mata pencaharian

No	Peranan/mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	Instansi/PNS	10	66,67
2.	Pengusaha industri pengalengan ikan	1	6,67
3.	Tokoh masyarakat/nelayan KJA	1	6,67
4.	LSM/nelayan	1	6,67
5.	Organisasi Masyarakat/juragan nelayan	1	6,67
6.	Nelayan pembudidaya ikan	1	6,67
	Jumlah	15	100

Sumber : Hasil Penelitian 2007

Berdasarkan data karakteristik responden pada Tabel 8, dianggap responden sangat berperan dan saling berhubungan dalam perencanaan pengelolaan pesisir di Muncar. Peneliti mendapatkan sejumlah responden yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 66,67% yang merupakan wakil dari tiap instansi yang terkait dengan masalah perencanaan pengelolaan pesisir. Kawasan pesisir pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat/orang yang memiliki keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda misalnya petani, industri, nelayan dan sebagainya, padahal setiap pengguna sumberdaya akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan dengan berbagai cara. Pemilihan responden yang beraneka jenis mata pencahariannya diharapkan memberikan dinamika tersendiri terhadap hasil pengamatan mengenai perencanaan pengelolaan pesisir.

Karakteristik responden berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Karakteristik responden berdasarkan umur dan jenis kelamin

No	Gol. Umur (tahun)	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Persentase (%)
1.	25-30	1	-	6,67
2.	31-40	3	-	20
3.	41-50	3	-	20
4.	51-60	5	1	40
5.	61-70	2	-	13,3
Jumlah		14	1	100

Sumber : Hasil Penelitian 2007

Distribusi umur dari responden selang 10 tahun memperlihatkan bahwa responden yang berusia 31-60 tahun menempati jumlah terbanyak yaitu 12 orang (80%). Jumlah responden pada komposisi umur ini menyebabkan responden lebih produktif, inovatif, adaptif dan spekulatif. Responden pada usia ini dianggap berpengalaman dalam merencanakan pengelolaan pesisir. Umumnya pada usia ini sifat manusia lebih bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan dan mengambil keputusan untuk menangani permasalahan tersebut. Responden yang berusia 61-70 sebanyak 13,33% lebih kuno dan paradoksal yaitu bertahan pada tradisinya dalam memandang perubahan-perubahan yang terjadi pada bidang kehidupan yang ada di sekitarnya.

Untuk karakteristik pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Karakteristik pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)	Persentase (100%)
1.	Tamat SD/Sederajat	2	13,33
2.	Tamat SLTP/Sederajat	1	6,67
3.	Tamat SLTA/Sederajat	2	13,33
4.	Diploma	-	-
5.	Perguruan Tinggi	10	66,67
Jumlah		15	100

Sumber : Hasil Penelitian 2007

Dilihat dari tingkat pendidikan sebesar 66,67 % responden telah menyelesaikan sampai jenjang Universitas/Perguruan Tinggi. Itu artinya bahwa "stakeholders" yang terlibat dalam perencanaan pengelolaan pesisir di muncar adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mampu menggabungkan faktor pengalaman dan rasionalitas ilmiah untuk mengambil keputusan. Responden yang tamat SD 13,33 %, tamat SLTP sebesar 6,67 % dan tamat SLTA sebesar 13,33 %. Masyarakat yang berpendidikan rendah faktor pengalaman lebih dominan dalam melakukan eksperimentasi, menerjemahkan informasi, teknologi dan inovasi sehingga membantu mereka dalam mengambil keputusan.

4.3 Profil Kegiatan dan Masalah di Pesisir Muncar

Dalam perencanaan pesisir harus diketahui profil kegiatan dan masalah yang ada untuk menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Kondisi umum perairan pesisir Muncar sudah sangat tercemar seperti yang telah dijelaskan di depan. Profil kegiatan dan masalah di pesisir Muncar dapat dilihat pada Lampiran 5.

Dengan melihat komponen kegiatan dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan di darat maupun di perairan akan memberi dampak pada komponen lingkungan hidup yaitu air sehingga dapat dipastikan wilayah pesisirlah yang paling menderita karena mendapat beban yang paling berat. Adanya aktifitas perikanan seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem antara lain terumbu karang dan mangrove serta menimbulkan konflik sosial dengan nelayan. Menurut Dahuri *et al.*, (2001) mangrove yang rusak tidak lagi berfungsi sebagai daerah mencari makan dan daerah asuhan yang optimal bagi bermacam ikan dan udang stadium muda yang komersial penting. Bisa dipastikan dampak selanjutnya adalah penurunan

hasil tangkapan nelayan. Adanya tempat pendaratan ikan yang belum representatif akan menyebabkan pencemaran air akibat dari air pematuan ikan yang menggenang dan mengalir ke laut.

Berkembangnya kawasan industri pengolahan perikanan akan berdampak pada komponen lingkungan air. Hal ini dikarenakan hampir seluruh usaha pengolahan ikan di Muncar belum ada sarana pengolahan limbah (IPAL) akibatnya limbah yang dihasilkan dari sisa produksi akan langsung dibuang ke laut. Dampak lanjutan dari kegiatan ini adalah persoalan sedimentasi, kesehatan umum dan perikanan

Pemukiman penduduk yang berada di bantaran sungai juga menyebabkan pencemaran air terutama oleh limbah domestik. Kegiatan yang berada di bawah wewenang Dinas Kimpraswil ini juga memiliki sistem sanitasi yang buruk dan drainase yang kurang sempurna.

Dari berbagai profil kegiatan yang dilakukan di pesisir Muncar menunjukkan bahwa betapa banyaknya sektor yang memanfaatkan pesisir Muncar. Meningkatnya kegiatan berbagai sektor menyebabkan adanya konflik dan tumpang tindihnya perencanaan akibat adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Menurut Mahi (1999) bahwa Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama yang dimanfaatkan oleh semua orang ("open access"), padahal setiap pengguna sumberdaya akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan sehingga sangat rentan terhadap kerusakan.

Masalah adalah perbedaan (kesenjangan) kondisi saat ini dengan kondisi lingkungan hidup yang kita inginkan (Sudaryanti, 2003b). Dari profil masalah yang ada di pesisir Muncar terlihat jelas betapa kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi. Masalah yang harus dihadapi tidak saja bersifat teknis tapi juga menyangkut masalah

sosial, tata ruang dan penegakan hukum. Menurut Sudaryanti (2003a) masalah dalam pengelolaan lingkungan hidup meliputi masalah yang bersifat teknis, sumberdaya manusia maupun kelembagaan. Masalah yang bersifat teknis disebabkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia di berbagai sektor.

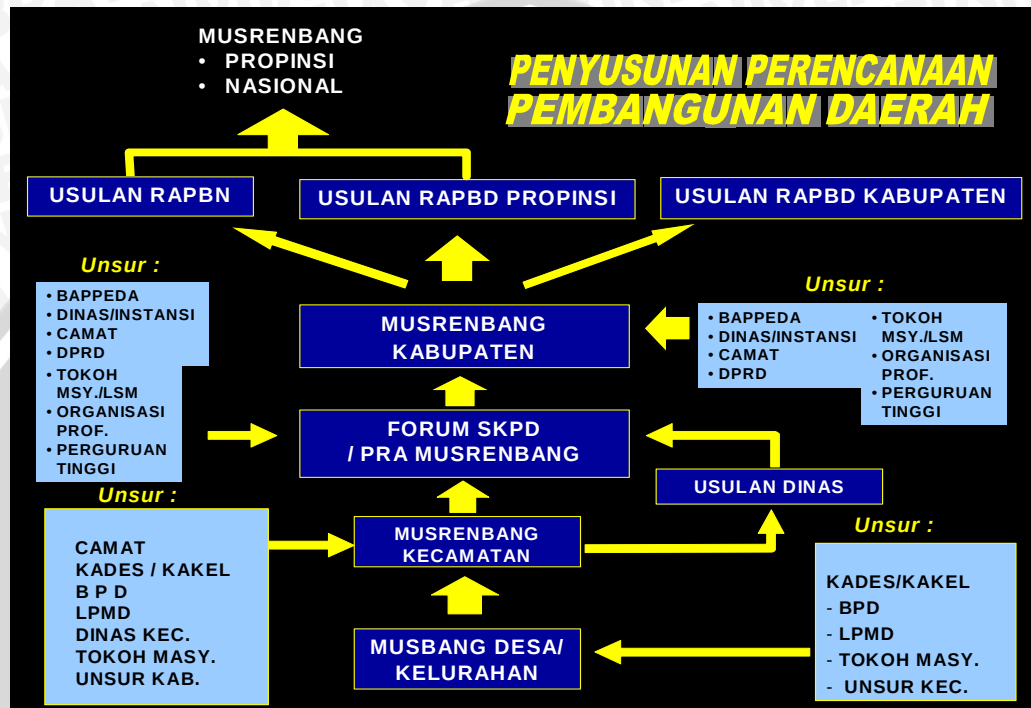
Masalah teknis yang ada di pesisir Muncar lebih banyak disebabkan oleh adanya kegiatan manusia di berbagai sektor misalnya pencemaran, "overfishing", kerusakan habitat flora fauna seperti rusaknya terumbu karang, rusaknya mangrove, penurunan hasil tangkapan ikan nelayan. Masalah sumberdaya manusia di pesisir Muncar meliputi konflik sosial antar nelayan dan pemanfaatan limbah oleh penduduk sekitar pabrik. Masalah kelembagaan meliputi lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran/penyimpangan RDTRK maupun lingkungan hidup.

Kondisi pencemaran yang sangat parah di Muncar sudah berlangsung lama namun penyelesaian untuk masalah pencemaran di Muncar belum pernah dilakukan. Sampai saat ini baru ada usulan program dari masing-masing dinas terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Diduga dalam memilih prioritas masalah kurang memperhatikan aspek lingkungan dan penentuan prioritas berdasarkan dana yang diajukan.

4.4 Proses Perencanaan Pesisir Muncar selama ini

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi umumnya tidak membedakan secara khusus kawasan pesisir dan kawasan lainnya. Tidak ada instansi khusus yang memerankan sebagai pengelola kawasan pesisir akan tetapi koordinasi antar sektor dibangun melalui jaringan dari perundang-undangan dan kebijakan yang ada. Kebijakan penataan ruang kawasan pesisir belum diatur secara legal melalui peraturan daerah tapi wacana

kebijakan penataan ruang wilayah pesisir telah secara intensif digulirkan oleh BAPPEDA sebagai badan perencana di daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 5.



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi

Gambar 5. Proses perencanaan pembangunan daerah Muncar tahun 2005

Keterangan :

- I. Musrenbang Desa/Kelurahan, dilaksanakan bulan Januari
 - Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan "stakeholders" desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

- Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya (musyawarah dusun/kelompok).
2. Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana Desa/Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.

- Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari :

1. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yang bersangkutan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta swadaya gotong royong masyarakat Desa.
2. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.
3. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa pada forum Musrenbang Kecamatan.

- Peserta

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat yang ada di Desa seperti Ketua RT/RW, kepala dusun, tokoh agama, wakil kelompok perempuan, pengusaha, wakil nelayan, komite sekolah dan lain-lain.

- Narasumber

Kepala Desa/Lurah, Camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa atau kecamatan dan LSM yang bekerja di Desa bersangkutan

II. Musrenbang Kecamatan, dilaksanakan sepanjang bulan Februari

- Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten pada tahun berikutnya.
- Musrenbang Kecamatan dengan tujuan antara lain :
 1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan alokasi dana des termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
 2. Mendapatkan rincian rancangan awal SKPD, khusus yang berhubungan dengan pembangunan (forum SKPD dan forum lintas SKPD).
 3. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan.

- Musrenbang Kecamatan menghasilkan antara lain :
 1. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota tahun berikutnya.
 2. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang disusun menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota.
 3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.
- Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk :
 1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
 2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
 3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
- Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah wakil dari Desa/Kelurahan dan wakil dari kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan (misalnya organisasi petani, organisasi sosial kemasyarakatan dan lain-lain)

- Narasumber

Dari Kabupaten/Kota : BAPPEDA, perwakilan dinas, kepala cabang dinas di kecamatan yang bersangkutan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Dari Kecamatan : Camat, aparat kecamatan, LSM dan para ahli/profesional yang bersangkutan

III. Musrenbang Kabupaten/Kota, dilaksanakan bulan Maret

- Tujuan Musrenbang Kabupaten/Kota antara lain :

1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rencana awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana Desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Propinsi, APBN dan sumber dana pendanaan lainnya.
2. Mendapatkan rincian rancangan awal SKPD, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan.
3. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan

IV. Program/kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten akan diusulkan pada Musrenbang propinsi/nasional untuk dibiayai dengan RAPBN.

Musrenbang tingkat propinsi dilaksanakan bulan April.

Tipe perencanaan seperti ini sangat rentan sekali jika dilakukan untuk kawasan pesisir yang dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses alamiah yang terjadi di lahan atas maupun laut lepas. Jika kita lihat peserta Musrenbang Desa

adalah wakil peserta Musrenbang tingkat Dusun sedangkan Musrenbang Kecamatan diikuti wakil peserta Musrenbang di bawahnya yaitu Desa begitu seterusnya. Hal ini memungkinkan adanya kekurangan/kehilangan beberapa informasi penting dalam mengambil keputusan di tingkat sebelum atau sesudahnya. Narasumber yang terlibat di Musrenbang tingkat kecamatan lebih lengkap dengan melibatkan BAPPEDA, perwakilan dinas dan para ahli yang dibutuhkan jika dibandingkan Musrenbang tingkat Desa dengan narasumber aparat kecamatan, pejabat instansi Desa. Padahal Musrenbang Desa sangat penting karena menghasilkan prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat Kecamatan. Jika salah dalam mengidentifikasi prioritas kegiatan maka program pembangunan yang dihasilkan akan kacau.

Responden dari masyarakat (wakil LSM) menyatakan bahwa perencanaan seperti itu jarang dilakukan. Berikut kutipan pernyataannya :

" Iya memang ada kegiatan rembug (musyawarah) desa tapi tidak untuk menghasilkan prioritas kegiatan seperti kata mbak tadi. Biasanya kita musyawarah desa untuk membahas masalah-masalah di desa yang nantinya menghasilkan peraturan desa atau kesepakatan lokal. Untuk tingkat kecamatan biasanya kita diundang tapi untuk mendengarkan presentasi tentang rencana yang akan dijalankan dan yang telah dilaksanakan"

Dalam perencanaan pesisir dengan menggunakan metode ZOPP maka seluruh "stakeholders" yang terkait dengan masalah pesisir baik itu instansi pemerintah (BAPPEDA, dinas terkait, Lurah, Camat, pejabat instansi dan lain-lain) maupun masyarakat (pengusaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan lain-lain) melakukan koordinasi dengan membentuk lokakarya untuk membahas perencanaan pengelolaan pesisir. Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh BAPPEDA selaku badan koordinasi pembangunan tingkat daerah. Dalam lokakarya akan dibahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pesisir dari semua

kegiatan/sektor yang terkait dengan pesisir. Dengan menentukan akar masalah dari masalah pokok yang ada maka dapat disusun program jangka panjang dan program jangka pendek untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan cara ini diharapkan tidak terjadi perencanaan yang saling tumpang tindih antar sektor karena semua rencana dapat dipadukan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebesar 60,01% (lihat lampiran 6, item 1.2) responden mengatakan bahwa proses perencanaan sudah bersifat "Bottom Up" artinya telah melibatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan. Responden yang menyatakan hal ini semuanya berasal dari perwakilan instansi terkait. Namun hal ini tidak dapat dibuktikan karena akses terhadap dokumen perencanaan sebelumnya (dibawah tahun 2006) sangat sulit. Beberapa instansi tidak bersedia memberikan dokumen perencanaan dengan alasan dokumen tidak ada atau hilang. Menurut Anonymous (tidak diterbitkan) bahwa syarat keberhasilan perencanaan dengan peran serta masyarakat adalah akses terhadap dokumen dan informasi dilakukan secara terbuka dan transparan.

Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa beberapa instansi tidak bersedia kinerja kantornya dievaluasi dengan tidak terbuka dalam komunikasi. Menurut Pratikto *et al.*, (2005) diperlukan keterbukaan komunikasi dalam perencanaan dan program pembangunan wilayah pesisir. Jika para pelaku tidak memberikan informasi sebenarnya maka bagaimana kita tahu dan kita tidak bisa membantu apapun. Maka untuk kebaikan bersama di masa depan diharapkan kerja sama yang baik antar berbagai pihak.

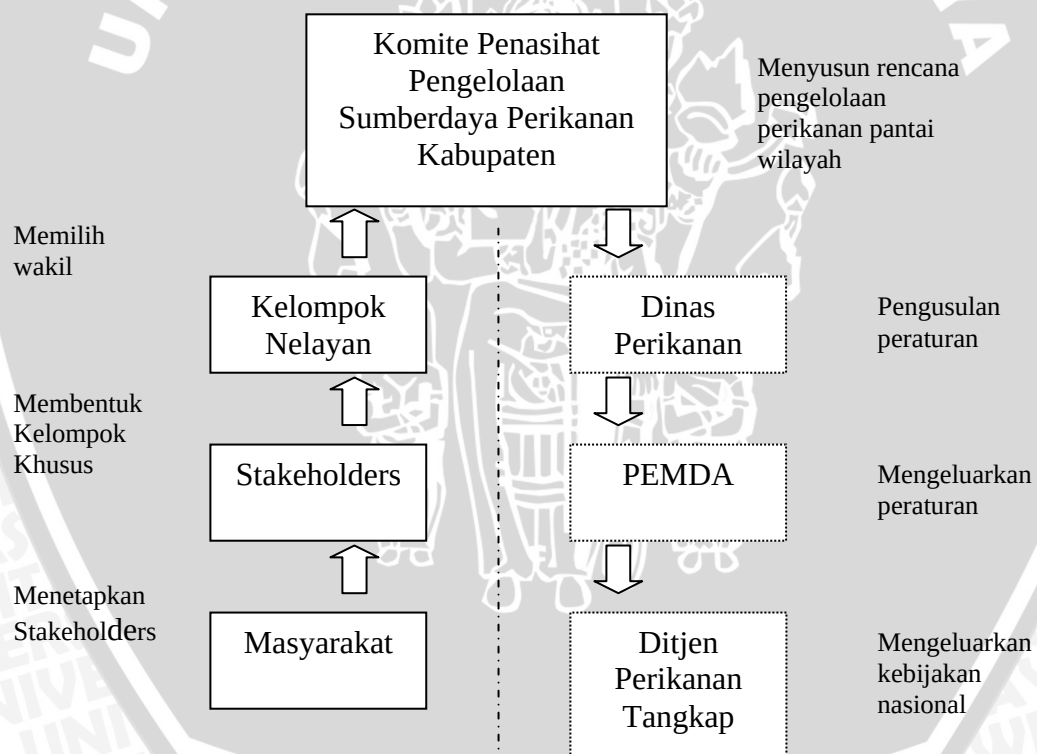
Sebanyak 29,41% responden mengaku tidak mengetahui secara keseluruhan proses perencanaan pesisir Muncar artinya masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan sampai pada tahap pengambilan keputusan. Responden yang mewakili "stakeholders" masyarakat mengatakan bahwa dalam perencanaan pengelolaan pesisir yang melibatkan masyarakat baru mulai tahun 1995 dilakukan. Ini berkaitan dengan proyek COFISH di Muncar dengan salah satu programnya yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir meskipun dari hasil evaluasi proyek program ini belum begitu berhasil dan perlu pembinaan dan pengawasan. Sebelumnya masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan pesisir Muncar. Berikut pernyataan "stakeholders" yang mewakili tokoh nelayan Muncar:

"Akhir-akhir ini saja mbak dengan adanya proyek COFISH kita sering rapat untuk membahas rencana-rencana pengelolaan pesisir Muncar. Sebelum ada proyek COFISH ya tidak pernah. Dulu tahun 1982 masyarakat Muncar minta pendalaman pantai tapi program dari Pemerintah malah kolam untuk keindahan. Jelas ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Waktu itu masyarakat sempat meminta Dinas Perikanan dan Kelautan untuk meninjau kembali proyek tersebut tapi menurut petugas DKP proyek ini sudah di tandatangani oleh Pak Menteri sehingga tidak bisa dirubah."

Berdasarkan kegagalan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Muncar selama ini misalnya tangkap lebih dan pencemaran, tidak terlepas dari sisitem pengelolaan yang dilakukan selama ini yaitu bersifat "top down". Selama ini kegiatan pengelolaan wilayah pesisir mulai dari membuat kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Menurut Mahi (1999) karakteristik wilayah pesisir baik dari segi sumberdaya alam maupun dari masyarakatnya sangat kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir seharusnya secara langsung melibatkan masyarakat lokal.

Implementasi dari program dan kegiatan yang berbasis masyarakat di wilayah pesisir adalah proyek pembangunan masyarakat pantai dan pengelolaan sumberdaya perikanan atau dikenal dengan COFISH-Project. Proyek ini dimulai tahun 1999 dan berakhir tahun 2005. Proyek ini telah memperkenalkan dan mengupayakan penerapan suatu konsep pengelolaan sumberdaya perikanan pantai berbasis komunitas dengan pendekatan partisipatif. "Stakeholders" pengelolaan sumberdaya perikanan pantai partisipatif adalah masyarakat pantai, sektor swasta dan instansi pemerintah.

Proses perencanaan pengelolaan sumberdaya perikanan selama proyek COFISH berlangsung dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Diagram alir pembentukan rencana dan aturan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis komunitas yang partisipatif

Selama proyek COFISH berlangsung dinas Perikanan dan kelautan hanya sebagai fasilitator dan Pemda hanya sebagi pemandu saja. Pihak proyek membentuk

kelompok-kelompok khusus seperti PSBK yang merupakan gabungan dari para "stakeholders". Dari rapat oleh PSBK diperoleh isu-isu yang berkembang dalam pengelolaan pesisir selanjutnya dilakukan inventarisasi masalah dan pengelompokan masalah. Hasil ini akan diserahkan ke DKP dan akan diformat selanjutnya akan diajukan ke tingkat pusat (Ditjen Perikanan Tangkap) untuk pendanaan. Hasilnya akan dilaporkan ke Pemda. Proses perencanaan ini hanya meliputi peran serta masyarakat saja tapi belum bisa disebut perencanaan pesisir terpadu karena hanya melibatkan pembangunan satu sektor saja yaitu perikanan.

Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama yang dimanfaatkan oleh semua orang. Padahal setiap pengguna sumberdaya akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan sehingga sangat rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan yang terpadu. Menurut Dahuri *et al* (2001) perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktifitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir.

Responden yang merupakan "stakeholders" dari sektor perikanan sebesar 11,76% menyatakan bahwa konflik yang selama ini tidak terselesaikan adalah antar kegiatan industri pengolahan ikan dan kegiatan perikanan. Selama ini limbah pabrik tersebut langsung dibuang ke laut tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga terjadi pencemaran. Berikut pernyataan salah seorang responden mengenai hal ini :

"Masalah limbah di Muncar ini sudah sangat parah yang mengakibatkan pencemaran. Penyebabnya adalah pembuangan limbah pabrik dan limbah domestik yang berasal dari perkampungan di bantaran sungai. Akibatnya jumlah tangkapan ikan nelayan menurun".

Kegiatan industri ini jelas akan mematikan sektor usaha yang lain misalnya perikanan. Kasus konflik antar kegiatan di pesisir terjadi karena kurangnya keterpaduan perencanaan antar sektor yang memanfaatkan sumberdaya daratan dan lautan. Diungkapkan oleh Alamsyah (1999) dalam Misran (2006) bahwa pencemaran lingkungan pesisir dan laut dapat diakibatkan oleh limbah buangan kegiatan di daratan seperti limbah rumah tangga, limbah industri maupun kegiatan atau aktivitas di lautan.

Berdasarkan pendataan yang dihimpun melalui Dinas Perikanan, mulai tahun 1990-1995 tentang kebijakan pembangunan wilayah pesisir Pemda telah merekomendasikan wilayah pesisir sebagai perikanan budidaya payau (tambak). Pada tahun kesatu sampai kelima hasil produksi perikanan tambak dapat meningkatkan PAD yang bersifat temporal (sementara). Pada tahun kelima, tambak yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi (salah satunya di Muncar) hampir tidak produktif dan terbengkalai. Dalam proses tersebut telah membabat hutan bakau beribu-ribu hektar yang kini mengalami degradasi. Akibatnya terjadi abrasi pantai yang meluas dan berkurangnya produksi ikan dibandingkan sebelum tahun 1990, padahal hutan bakau berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan dan pembesaran ikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan sektoral pada sektor perikanan ternyata belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan itu sendiri.

Dari hasil analisis masalah dan tingkat partisipasi dalam perencanaan pengelolaan pesisir disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan wilayah pesisir Muncar masih bersifat sektoral. Menurut Dahuri *et al* (2001) perencanaan dan pengelolaan secara sektoral biasanya berkaitan dengan satu macam pemanfaatan sumberdaya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu misalnya perikanan tangkap, tambak, industri dan sebagainya. Oleh karena itu

diperlukan keterpaduan dalam perencanaan wilayah pesisir mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada monitoring atau evaluasi

4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pesisir Muncar

Partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya. Partisipasi masyarakat lokal diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi, potensi, serta permasalahan, maka kebutuhan lokal akan lebih terdefinisi.

Dari 15 responden yang saya temui 46.67% responden mengaku selalu terlibat dalam proses perencanaan pesisir. 46.67% responden menyatakan tidak selalu dilibatkan dan 6,67% responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan (lihat Lampiran 6). Berdasarkan partisipasi dalam proses perencanaan termasuk partisipasi pasif karena tidak dilibatkan dalam proses perencanaan sampai pada tahap pengambilan keputusan (komunikasi pribadi Sudaryanti, 2007) i). Mengenai alasan mereka berpartisipasi dalam pengelolaan pesisir 33,33% responden mengaku karena kesadaran diri. Kesadaran diri ini timbul karena melihat kondisi lingkungan yang semakin rusak dan mengancam kelestarian sumberdaya perikanan sebagai sumber kehidupan mereka.

Pernyataan ini diberikan oleh salah satu responden yang menyatakan bahwa :

"keikutsertaan saya dalam merencanakan pengelolaan pesisir karena saya ingin lingkungan yang rusak ini menjadi baik kembali seperti dulu. Saya melihat kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai, erosi, pencemaran yang semua ini mengancam hidup kami karena kehidupan kami dari unsur perikanan. Saya ingin sumberdaya perikanan tetap lestari".

i) Op sit halaman 3

13,33% responden mengaku berpartisipasi karena status mereka sebagai tokoh masyarakat. Hal ini karena dalam proses perencanaan tokoh masyarakat menampung segala aspirasi dari masyarakat dan menyampaikannya pada forum. Responden yang berpartisipasi karena pengabdian pada negara sebesar 66,67%. Pihak ini adalah wakil dari instansi-instansi terkait yang berpartisipasi karena tugasnya sebagai abdi negara.

Dari hasil tabulasi kuesioner untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat dalam perencanaan pesisir Muncar (lihat lampiran 6) menunjukkan bahwa 76,47% responden menyatakan bahwa peran masyarakat dalam perencanaan selama ini adalah aktif. Bentuk partisipasi masyarakat yaitu dalam memberikan informasi yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Partisipasi dari masyarakat meningkat sejak ada proyek COFISH hal ini terlihat dari kehadiran mereka dalam setiap rapat yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat untuk membahas rencana pengelolaan pesisir.

Bentuk partisipasi seperti ini disebut partisipasi fungsional. Menurut Pretty dan Hart *dalam* Murdiyanto (2004) partisipasi fungsional adalah tingkat partisipasi dimana anggota masyarakat berperan serta dengan membentuk kelompok-kelompok yang diprakarsai oleh pihak luar untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh proyek. 13,33% responden menyatakan tidak tahu tentang perannya dalam perencanaan pesisir. Pihak ini adalah pihak yang tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan pesisir di Muncar.

Jika dikomparasikan dengan metode ZOPP maka partisipasi seperti ini kurang sempurna. Untuk keberhasilan perencanaan, peran serta atau partisipasi masyarakat harus dilibatkan dari awal perencanaan sampai tahap pengambilan keputusan yaitu penentuan program untuk mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat semacam ini akan

mengurangi konflik yang terjadi dalam tahap pelaksanaan karena kesepakatan akhir dari kebijakan yang dihasilkan telah dipahami bersama berikut alasannya

4.6 Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Perencanaan Pengelolaan Pesisir Muncar

Faktor pendorong dalam proses perencanaan pengelolaan wilayah pesisir antara lain keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Informasi yang diperoleh dari 6,67% responden menyatakan bahwa mulai ada keinginan dari masyarakat untuk berperan serta dalam mengelola sumberdaya pesisir. Hal ini tidak lepas dari program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Tokoh masyarakat Muncar menyatakan bahwa

"saya sebagai tokoh masyarakat sangat senang karena masyarakat peduli terhadap masalah-masalah yang ada. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ganjalan tapi saya rasa tidak begitu masalah".

20% responden mengatakan bahwa kelancaran proses perencanaan dikarenakan adanya upah dalam pelaksanaan program. Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan hasil perencanaan karena diberikan upah yang sesuai.

Dalam perencanaan pengelolaan pesisir Muncar banyak sekali faktor penghambat yang dihadapi. Faktor penghambat pertama yang menduduki nilai tertinggi yaitu lebih dari 50% adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antar "stakeholders" sehingga mengakibatkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan hasil rencana. 50% responden menyatakan banyak sekali hal-hal yang telah disepakati bersama tapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Berikut salah satu pernyataan responden yang merupakan ketua organisasi masyarakat :

"saya itu terkadang malas untuk ikut rapat-rapat karena banyak pihak yang memungkiri hasil kesepakatan rapat. Jadi meskipun sudah disepakati bersama tapi pelaksanaannya sendiri-sendiri. Saya tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi mungkin banyak pihak yang iri karena tujuan –tujuannya yang tidak tercapai".

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kurangnya koordinasi dan kerjasama antara "stakeholders" menyebabkan pengelolaan kawasan pesisir bersifat sektoral. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang responden bahwa :

"kita sudah sering mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk BAPPEDA untuk membahas masalah pesisir tapi tidak ada hasilnya. Mereka (BAPPEDA) biasanya menyewa konsultan dari perguruan tinggi seperti UGM tapi celakanya hasilnya tidak ada artinya tidak ada laporan yang jelas. Disini Egosektoral masih muncul".

Faktor yang kedua yaitu masyarakat tidak dilibatkan dalam seluruh proses perencanaan. 33,33% responden menyatakan bahwa dirinya tidak selalu dilibatkan dalam seluruh proses perencanaan artinya tidak sampai pada tahap pengambilan keputusan. Misalnya saja untuk kegiatan yang merupakan persoalan nasional seperti penanganan limbah Muncar masyarakat hanya dimintai informasi tapi tidak diikutkan dalam rapat koordinasi untuk membahas langkah apa yang sesuai. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh seorang responden bahwa :

"saya adalah orang yang paling peduli terhadap masalah-masalah di Muncar utamanya masalah lingkungan. Sejak tahun 1982 saya mengusulkan penanganan limbah di Muncar. Enam bulan lalu saya selalu dimintai informasi seputar masalah limbah disini tapi saya sekarang saya tidak tahu kelanjutannya karena tidak pernah dihubungi untuk membahas itu lagi".

Dari informasi yang diperoleh peneliti dari Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi telah diadakan koordinasi penanganan limbah pada bulan Januari 2007 di Bali. Jika melihat kondisi tersebut maka peran serta masyarakat disini tidak dilibatkan. Menurut Tim Perumus Hasil Lokakarya Tahapan Perencanaan Di Kabupaten Bima (2002) bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan dan terlibat dalam perencanaan guna menentukan arah dan agenda pembangunan sampai tahap evaluasi. Responden yang lain juga menyatakan bahwa :

” saya tidak selalu dilibatkan dalam perencanaan. Mungkin kalau penyelesaian konflik yang sifatnya lokal saya selalu terlibat sebagai tokoh masyarakat tapi kalau tingkat kabupaten saya kurang tau. Apa mungkin undangan yang dikirim tidak sampai pada saya”.

Dari sini dapat saya simpulkan bahwa ”stakeholders” tingkat bawah tidak selalu ikut serta dalam pengambilan keputusan di atasnya. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan kemungkinan besar tidak akan dipatuhi oleh masyarakat sebagai obyek pembangunan. Misalnya saja Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kabupaten Banyuwangi. Setelah lima tahun disahkan tapi kondisi perairan Muncar masih saja tercemar bahkan bertambah parah. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat tidak punya rasa memiliki dan ikut serta menjalankan isi peraturan karena memang tidak dilibatkan dalam perencanaannya.

Faktor penghambat yang ketiga adalah tidak bisa menentukan skala prioritas. Sebesar 33,33% responden menyatakan bahwa dalam pengambilan keputusan seringkali menghadapi hambatan yaitu sulitnya menentukan skala prioritas. Kesulitan ini disebabkan karena kurangnya informasi yang dibutuhkan untuk membantu mengambil keputusan. Hal ini dinyatakan oleh responden dari Instansi Pemerintah :

”selama ini kita kurang bisa menentukan skala prioritas karena kurangnya informasi. Kadangkala juga masyarakat dalam menentukan prioritas tidak disertai dengan penjelasan ilmiah”.

Di tingkat Kecamatan Muncar, penentuan skala prioritas hanya didasarkan pada usulan kegiatan yang belum terealisasi pada tahun ini akan di prioritaskan pada usulan kegiatan untuk perencanaan tahun depan sedangkan penentuan skala prioritas di tingkat Kabupaten didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan alokasi dana yang tersedia. BAPPEDA membenarkan adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas

karena data yang dibutuhkan tidak tersedia atau data yang ada sudah lama sehingga diragukan kebenarannya.

Dalam metode ZOPP penentuan skala prioritas menggunakan kriteria kesepakatan berdasarkan diskusi dengan para ahli dan studi pustaka. Dengan adanya kesepakatan berarti ada komitmen dari semua pihak yang terlibat. Walaupun kesepakatan dijadikan kriteria pertama dalam proses ini, namun untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan maka digunakan kriteria yang bersifat kuantitatif misalnya menggunakan ELI (Extention, Leverage, Intensity). "Extention" adalah masalah itu sendiri terhadap jumlah manusia yang terkena, wilayah yang terkena, dan banyaknya komponen lingkungan hidup yang terkena. "Leverage" adalah keterkaitan suatu masalah terhadap masalah lainnya. Semakin tinggi nilai leverage suatu masalah berarti pengatasan masalah tersebut akan mampu mengatasi banyak masalah lainnya. "Intensity" menunjukkan kuatnya dan besarnya suatu masalah. Hal ini mencerminkan ukuran lamanya, sifat tidak berbaliknya, dan ciri-ciri kumulatifnya (Sudaryanti, 2003b).

Jika melihat kondisi pesisir Muncar saat ini seperti pencemaran dan "overfishing" maka orientasi pembangunan masih berfikir jangka pendek. Tujuan jangka pendek adalah meraih keuntungan materiil dengan mengeksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan lebih penting dibandingkan tujuan jangka panjang dengan memperhatikan kesediaannya secara berlanjut bagi masa depan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Profil kegiatan yang dilakukan di pesisir Muncar melibatkan banyak sektor antara lain perikanan, perindustrian, pemukiman dan lingkungan hidup. Profil masalah menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang ada baik yang bersifat teknis, sosial, tata ruang dan penegakan hukum.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pesisir Muncar termasuk partisipasi pasif sehingga perencanaannya masih bersifat "topdown". Tidak ada rambu-rambu dalam penentuan prioritas masalah sehingga program yang dijalankan tidak berdasarkan akar masalah. Jika dikomparasikan dengan metode ZOPP yang dalam proses penyusunan perencanaannya melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan tujuan yang akan dicapai maka proses perencanaan pengelolaan pesisir Muncar selama ini belum terpadu.
- 3) Faktor pendorongnya adalah mulai ada keinginan dari masyarakat untuk berperan serta dalam mengelola sumberdaya pesisir dan adanya upah dalam pelaksanaan program. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya koordinasi dan kerjasama antar "stakeholders" sehingga mengakibatkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan hasil rencana, masyarakat tidak selalu dilibatkan dalam seluruh proses perencanaan artinya tidak sampai pada tahap pengambilan keputusan, sulitnya menentukan skala prioritas.

5.2 Saran

Dari bahasan yang telah dikemukakan, ada beberapa saran kebijakan antara lain :

- 1) Perencanaan pengelolaan pesisir muncar sebaiknya dilakukan secara terpadu dan partisipatif dengan melibatkan "stakeholders" serta ditunjang dengan bahan kajian baik dari tata ruang, sosial serta ekosistem. Agar perencanaan tersebut bisa berjalan perlu dibentuk lembaga/komisi independen non pemerintah yang tugasnya mengkoordinasikan instansi terkait, masyarakat dan "stakeholders" lainnya untuk pengambilan keputusan pengelolaan wilayah pesisir (Komunikasi pribadi Sri Sudaryanti, 2007)
- 2) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengkaji kondisi yang ada di wilayah pesisir tapi juga kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan melibatkan responden dari pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, Perguruan Tinggi dan Polairud. Input data perlu ditambah profil kesehatan masyarakat dan profil sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F.B dan S.M Sirait. 1984. Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem untuk Proyek Pembangunan. Cetakan Kedua. Penerbit PT. Bina Aksara. Jakarta.
- Anonymous. Pemberdayaan Masyarakat Berperan Serta dalam Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi. (tidak diterbitkan).
- , 2001. Pedoman Umum Pengelolaan Pesisir Terpadu. Disampaikan Pada Temu Pakar “ Pengelolaan Pesisir Terpadu dan Berkelanjutan” Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Hotel Sentra. Jakarta. 13 Nopember 2001.
- , 2002. Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan Era Otonomi Daerah. Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Cetakan Pertama. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- , 2005. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Cetakan Kedua. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- , J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Darmono. 2001. Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya Dengan Toksikologi Senyawa Logam. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2004. Laporan Pekerjaan Akhir Resource and Ecological Assessment (REA) Tahap II Tahun Anggaran 2004. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Bagian Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Banyuwangi. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya. Malang.
- Dewi, M. 2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Banyuwangi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Handoko, T.H. 2000. Manajemen. Edisi 2. Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

[http://www.goodgovernance.or.id/Download.asp?file=A02-Analisis Cepat SWOT.pdf](http://www.goodgovernance.or.id/Download.asp?file=A02-Analisis+Cepat+SWOT.pdf). Analisa Cepat S.W.O.T. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2006.

<http://www.penataanruang.pu.go.id/ta/Lapdul04/P2/PraswilKalimantan/Bab3.pdf>. Bab III Metodologi Dan Pendekatan. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2006.

http://www.perform.or.id/files/library/cna_ws_id.pdf. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan-WS. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2006.

Kristanto, P. 2002. Ekologi Industri. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.

Mahi, A.K. 1999. Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Secara Terpadu ("Integrated Lampung Coastal Zone Management"). Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Lampung ke-34 di Bandar Lampung. 23 September 1999.

Marzuki. 1989. Metodologi Riset. Cetakan keempat. Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Misran, E. 2006. Aplikasi Teknologi Berbasiskan Membran dalam Bidang Bioteknologi Kelautan : Pengendalian Pencemaran. [www. google.com](http://www.google.com). Diakses Bulan September 2006.

Mitchell, B., B. Setiawan dan D.H. Rahmi. 2003. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Cetakan Kedua. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Moesa, S. 2002. Ilmu Lingkungan : Ekosistem, Manusia, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Cetakan Pertama. Universitas Syiah Kuala. Darussalam.

Murdiyanto, B. 2004. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai. COFISH Project. Jakarta.

Muzdalifah. 2003. Studi Partisipasi Masyarakat Terhadap Upaya Rehabilitasi Mangrove di Blok Muara Bengawan Solo, Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan.

Pratikto W.A.,A. Supardan.,F.H. Djais.,Y. Mulyana.,I. Idris.,A.SW. Retraubun.,S. Saad. 2005. Menjual Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Cetakan pertama. Penerbit Cikal Media. Jakarta.

Singarimbun, M dan S. Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Cetakan Kedua. Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

Subiyanto. 2002. Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam Pemilihan Obyek Agrowisata. www.ipteknet.com. Diakses Bulan Oktober 2006.

Sudaryanti, S. 2002. Metode Pengendalian Pencemaran Laut. Materi Pelatihan Pemantauan dan Pengendalian Terumbu Karang dan Mangrove di Propinsi Bali. Diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, ASDEP Urusan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, 15-18 Juli 2002.

-----, 2003a. Pentingnya Keterpaduan dalam Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disampaikan pada kegiatan Pembinaan kepada aparat Kabupaten Pasuruan. Diselenggarakan oleh BAPEDALDA Kabupaten Pasuruan, 29-30 September 2003.

-----, 2003b. Training Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. Materi Pelatihan Training di Lamongan. Diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan BAPEDAL Propinsi Jawa Timur dan Proyek Bejis, 6-9 Mei 2003.

Suratmo, F.G. 1991. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Suryabrata, S. 1983. Metodologi Penelitian. Cetakan Pertama. CV Rajawali. Jakarta.

Sutardjo. Peran Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Perairan. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan. (Tidak Diterbitkan).

Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Edisi Revisi. Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Tim Perumus Hasil Lokakarya Tahapan Perencanaan Di Kabupaten Bima. 2002. Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kabupaten Bima. <http://www.gtzpromis.or.id>. Diakses Bulan Oktober 2006.

Wardhana, W.A. 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan. Cetakan Pertama. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.

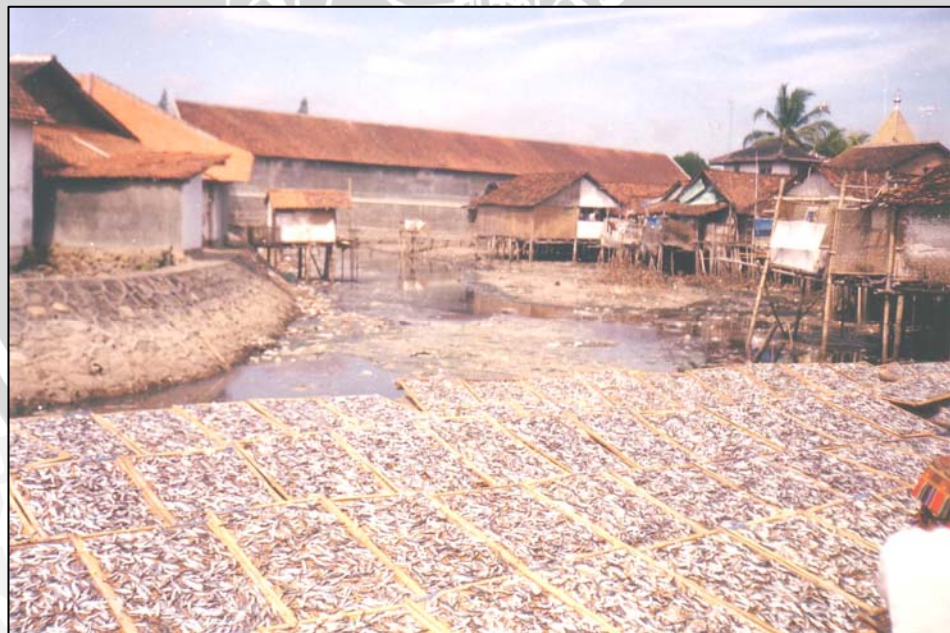
Wijanto, S.E. 2006. Limbah B3 dan Kesehatan. [www. google.com](http://www.google.com). Diakses Bulan September 2006.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil pengamatan di perairan pantai Muncar pada tanggal 29 Oktober 2006



Lokasi : Sungai Kalimati



Lokasi : Sungai Kalimati

(Lanjutan)

Lampiran 1. Hasil pengamatan di perairan pantai Muncar pada tanggal 29 Oktober 2006



Lokasi : Sungai Tratas



Lokasi : Sungai Tratas

Lampiran 2. Keadaan pencemaran perairan Muncar oleh limbah industri maupun limbah rumah tangga tahun 2004

No	Lokasi	Parameter	Keterangan
1	Muara Kalimati	COD	Kadar COD tinggi melebihi ambang batas (575.2 ppm) mestinya di bawah 10 ppm. tingginya COD disebabkan oleh adanya beban pencemaran yang tinggi. Nilai COD berkisar 2000 mg/l-5000 mg/l *
		BOD	Nilai BOD berkisar antara 6000 mg/l – 14000 mg/l *
		NO ₂ -N	Kadar Nitrit diatas ambang batas (1.90512 ppm) karena mendapat masukan bahan limbah organik rumah tangga sehingga tidak dapat diurai secara sempurna
2	Semua perairan di Muncar	PO ₄ -P	Telah melebihi ambang batas (1.90750 ppm) mestinya kurang dari 0.1 ppm. Hal tersebut dapat menimbulkan blooming plankton
3	Semua perairan di Muncar	Unsur logam berat Fe, Pb, Zn, Cu, Hg	Masih di bawah ambang yang diperbolehkan sedangkan Hg melebihi ambang batas yang diperbolehkan yaitu 0.44137 ppm seharusnya <0.005 ppm
4	PPI Muncar	Natrium	Kandungan sangat tinggi dari ambang batas (11424 ppm), mestinya <10 ppm. Natrium ini dihasilkan oleh limbah minyak ikan utamanya dari lemuru
	<i>Berdasarkan hasil analisa index Shannon dan Weaver</i>		
	Kalimoro		
5	Kayuaking	H= 0.60796	Tercemar Berat
6		H=2.25307	Tercemar sedang

Sumber : Departemen Kelautan dan Perikanan dalam REA II, 2004

* : Laporan Praktek Kerja Lapangan, Tahun 2006

Lampiran 3. Tahapan penelitian

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tujuan	Output
22-08-2006 sampai 22-10-2006	- Observasi kondisi lingkungan Muncar - Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah pencemaran di muncar	- Desa Kedungrejo dan desa Tembokrejo - Perairan pantai Muncar - Sungai Kalimati - Pelabuhan perikanan Muncar Dari berbagai sumber seperti surat kabar dan internet	Survai pendahuluan Bahan literatur	Mendapatkan gambaran kondisi pesisir Muncar Memperoleh gambaran penelitian
13-11-2006	Pengajuan proposal penelitian	Diajukan kepada dosen pembimbing	Melakukan penelitian	ACC proposal
01-01-2007	Mengurus surat izin penelitian	Fakultas Perikanan Unibraw	Memperoleh surat izin penelitian	Diizinkan
05-01-2007	Kunjungan ke Dinas Bakesbanglinmas Kabupaten banyuwangi	Jl. HOS Cokroaminoto, Cuningking	Memasukkan surat izin penelitian	Diizinkan
29-01-2007	Kunjungan ke BAPPEDA	Jl. Adisucipto 23 Banyuwangi. Telp : (0333) 427344	Memasukkan surat izin penelitian	Diizinkan
30-01-2007	idem	idem	- Wawancara dengan staf BAPPEDA (Pak Tjatur, Pak Luthfi dan Pak Widodo) - meminta data yang berkaitan dengan perencanaan pengelolaan pesisir Muncar	- Wawancara selesai - Pencarian data yang dibutuhkan

Lampiran 3. Tahapan penelitian (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tujuan	Output
31-01-2007	Idem	Idem	Mengambil data/dokumen	- diperoleh proses perencanaan menurut BAPPEDA - dokumen tata ruang kawasan Muncar - proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
31-01-2007	Kunjungan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi	Jl. Jenderal A.Yani No.100 Banyuwangi Telp : (0333) 425001	- Wawancara dengan Pak Soebandiyono - Meminjam buku	- Pak Soebandiyono sedang tugas di lapang - Meminjam buku pengelolaan sumberdaya perikanan pantai
01-02-2007	Idem	Idem	- Wawancara dengan pak Soebandiyono - Mengembalikan buku - Meminta dokumen laporan rencana strategis DKP tahun 2007	- Wawancara terstruktur - Mempelajari isi dari dokumen laporan rencana strategis DKP tahun 2007
02-02-2007	Idem	Idem	- Wawancara bebas dengan Pak Soebandiyono - Meminta data potensi wilayah pesisir Muncar	- Mengetahui proses perencanaan menurut DKP - Mengetahui masalah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan Muncar - Laporan <i>Resource and Ecological Assessment (REA)</i> II tahun 2004
08-02-2007	Kunjungan Ke Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi	Jl. Adisucipto Banyuwangi	- Memasukkan surat izin - Wawancara dengan Pak Selamet	- Diizinkan - Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur

Lampiran 3. Tahapan penelitian (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tujuan	Output
08-02-2007	Kunjungan Ke Dinas Kimpraswil Kabupaten Banyuwangi	Jl. H.O.S Cokroaminoto, Glagah Banyuwangi	- Memasukkan surat izin penelitian - Permohonan wawancara - Meminta program dari dinas yang berkaitan dengan pesisir Muncar	- Diizinkan penelitian - Dokumen RUTRW Banyuwangi dan RUTRK Muncar
08-02-2007	Pertemuan di rumah responden	Jl. Airlangga No. 60 Kebalenan, Banyuwangi	Wawancara dengan Pak Reza, salah satu staf di Dinas Kimpraswil	- Wawancara terstruktur
09-02-2007	Kunjungan Ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jl. Adisucipto Banyuwangi	- Memasukkan surat izin penelitian - Wawancara dengan staf Disperindag yang telah ditunjuk	- Diizinkan - Wawancara terstruktur dengan kabit perindustrian yaitu Pak Sudjiran dan Pak Kusdi - Program Disperindag untuk menanggulangi pencemaran di Muncar
09-02-2007	Kunjungan ke bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	Kantor Pemda Kabupaten Banyuwangi	- Memasukkan surat izin penelitian - Wawancara dengan Kasubag Pemantauan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	- Diizinkan - Wawancara terstruktur dengan Pak Tri - Peran bagian lingkungan hidup dalam perencanaan pengelolaan pesisir Muncar - Program bagian lingkungan hidup untuk penanganan masalah pencemaran di Muncar

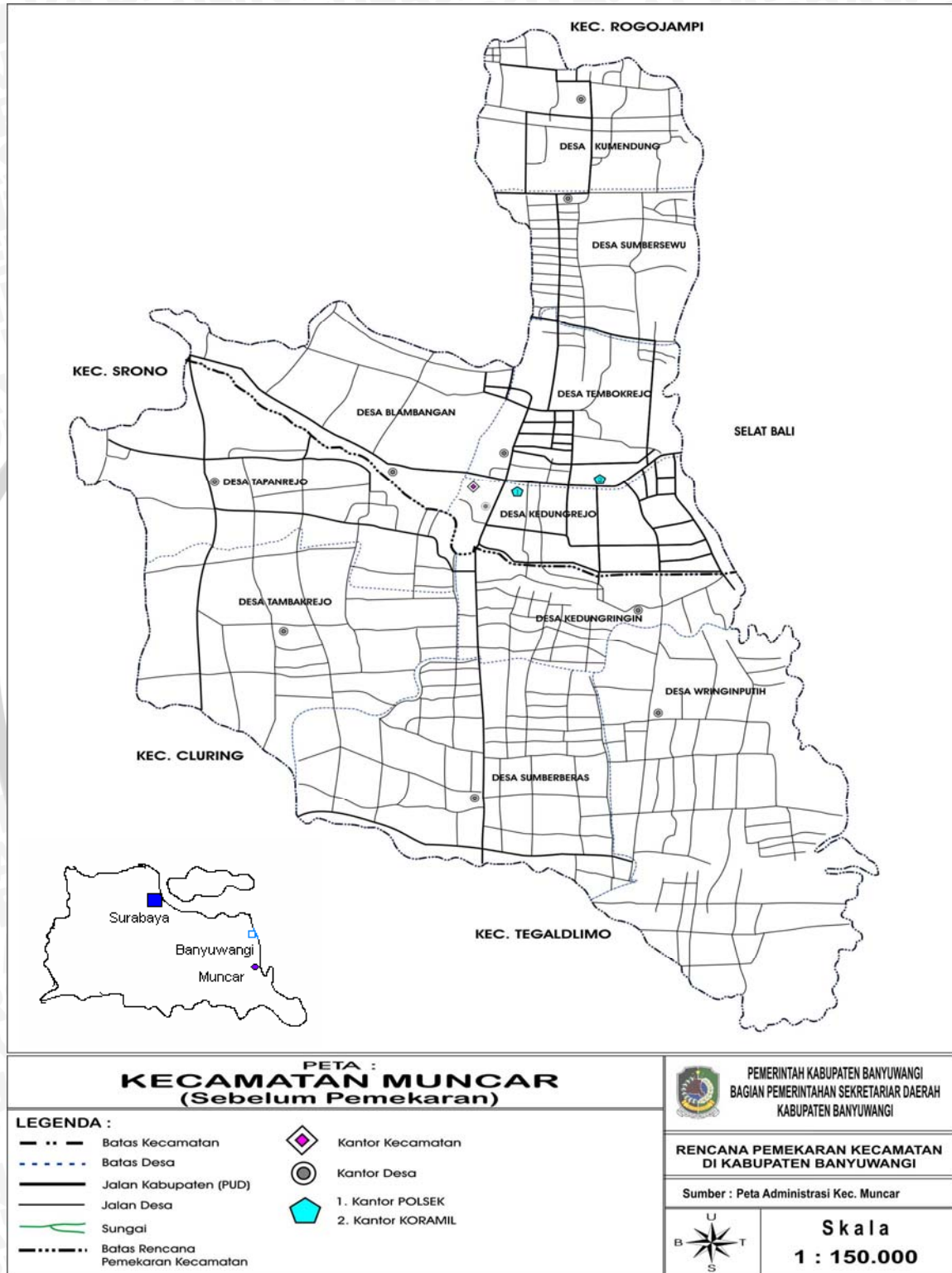
Lampiran 3. Tahapan penelitian (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tujuan	Output
4-02-2007	Wawancara "stakeholders"	Warung kopi di jalan Basuki Rahmat, Lateng, Banyuwangi	- Wawancara dengan pak Arifin, salah satu ketua LSM di Muncar	Proses perencanaan pengelolaan pesisir Muncar menurut masyarakat Muncar
20-02-2007	Wawancara "stakeholders"	PT. Belambangan Raya Muncar (industri pengalengan ikan dan penepungan)	- Wawancara dengan Pak Thamrin, manajer operasional PT. Belambangan Raya	- Responden tidak bersedia menjawab seluruh isi <i>question naire</i> karena merasa bukan bidangnya - Memperoleh gambaran peran industri dalam perencanaan pesisir Muncar
20-02-2007	Wawancara "stakeholders"	PT. Avilla Prima Muncar (industri pengalengan ikan dan coldstorage)	Memasukkan surat izin penelitian dan wawancara	Ditolak, peneliti yang ingin mendapatkan data atau wawancara dengan PT. Avilla Prima harus melakukan magang minimal selama dua minggu
20-02-2007	Wawancara "stakeholders"	Desa Kedungrejo, Kampung Bugis	Wawancara dengan Pak Selamat B.G, tokoh masyarakat sekaligus ketua kelompok nelayan KJA	- Wawancara terstruktur - Proses perencanaan pesisir yang masih bersifat "top down"
20-02-2007	Wawancara "stakeholders"	Desa Kedungrejo, Pasar Ikan Brak, Muncar	Wawancara dengan Pak Mastur, nelayan KJA	- Tidak memperoleh tambahan informasi yang berarti karena keterangan yang diberikan hampir sama dengan keterangan Pak Selamat BG dan Pak Soebandiyono

Lampiran 3. Tahapan penelitian (lanjutan)

Tanggal	Kegiatan	Lokasi	Tujuan	Output
20-02-2007	Wawancara "stakeholders"	Dusun Sampang, Desa Kedungrejo, Muncar	Wawancara dengan Pak H. Zainullah, ketua organisasi masyarakat kelompok Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Komunitas (PSBK)	Wawancara tidak bisa dilakukan hari itu juga karena Pak Zainullah ada kepentingan di Pelabuhan.
20-02-2007	Kunjungan ke kantor Kecamatan Muncar	Jl. Pelabuhan, Desa Belambangan, Kecamatan Muncar	- Memasukkan surat izin dan penelitian wawancara	- Diizinkan - Wawancara dan pengambilan data yang diperlukan pada tanggal 21-02-2007
21-02-2007	Kunjungan ke kantor Kecamatan Muncar	Jl. Pelabuhan, Desa Belambangan, Kecamatan Muncar	- Wawancara dengan Bu Mudjilah, staf kecamatan Muncar - Meminta data jumlah penduduk Muncar menurut pekerjaannya	- Wawancara terstruktur - Data jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan - Proses perencanaan kawasan Muncar menurut dinas Kecamatan Muncar
21-02-2007	Wawancara "stakeholders"	Dusun Sampang, Desa Kedungrejo, Muncar	Wawancara dengan Pak H. Zainullah, ketua organisasi masyarakat kelompok Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Komunitas (PSBK)	- Wawancara terstruktur
02-04-2007	Kunjungan ke Dinas Pengairan	Jl. Adi Sucipto Banyuwangi	Mencari data tentang pengelolaan DAS di Muncar	- Peneliti disarankan ke UPTD Dinas Pengairan di Muncar
03-04-2007	UPTD Dinas Pengairan Muncar	Desa Tapanrejo, Muncar	Idem	- Tidak ada data yang dicari - Peneliti disarankan menemui pak Sunoto
04-02-2007	Menemui Pak Sunoto	Dinas Pengairan	idem	- Data yang dicari belum ada

Lampiran 4. Peta wilayah kecamatan Muncar



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi

□ : Lokasi Peta

Lampiran 5. Profil kegiatan dan masalah di pesisir Muncar

Instansi	Kegiatan	Komponen Kegiatan	Lokasi	Masalah	Komponen Lingkungan Hidup
Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi	- Mengelola, mengembangkan dan mengatur kegiatan perikanan	Darat, Air Air	Wilayah pesisir dan laut Muncar	- Kepemilikan sumberdaya - Kemiskinan - Konflik sosial nelayan - Pembagian hasil - Penggunaan alat tangkap	Air, flora, fauna, sosial
	- Perikanan Tangkap*	Air	Selat Bali, sungai-sungai yang bermuara di Teluk pangpang	- Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (potasium dan sianida), menyebabkan banyak ikan kecil mati - Penambahan atau pengembangan alat tangkap dan nelayan andon - Persaingan antar nelayan di daerah penangkapan ikan, sementara unit penangkap ikan di dalamnya meningkat - "overfishing" - Konflik sosial antar nelayan	Air, flora, fauna, sosial

Lampiran 5. Profil kegiatan dan masalah di pesisir Muncar (Lanjutan)

Instansi	Kegiatan	Komponen Kegiatan	Lokasi	Masalah	Komponen Lingkungan Hidup
Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi	- Perikanan Budidaya (keramba jaring apung) *	Air	Teluk Pangpang	- Pencemaran laut oleh sisa pakan - Pemanfaatan KJA masih jauh di bawah potensi yang ada	- Air, fauna
	- Budidaya tambak*	Air	Desa Wringinputih	- Pencemaran air - Banyak ikan dan karang mati oleh limbah saponin - Konversi hutan mangrove untuk tambak dapat menurunkan kualitas lingkungan	
	- Pengelolaan mangrove	Pantai	Desa Kedung Ringin Dusun Tratas	- Penebangan mangrove - Konversi lahan mangrove - Pencemaran - Rusaknya mangrove karena kualitas tanah akan turun (menjadi tanah tua)	- Air, fauna
	- Pengelolaan terumbu karang	Air	Pasir putih, Kayu Aking	- Terumbu karang rusak akibat pengeboman ikan, jangkar perahu nelayan	- Air, flora, fauna

Lampiran 5. Profil kegiatan dan masalah di pesisir Muncar (Lanjutan)

Instansi	Kegiatan	Komponen Kegiatan	Lokasi	Masalah	Komponen Lingkungan Hidup
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi	- Tempat Pendaratan Ikan	Darat	Pelabuhan Sampungan, Kalimoro dan Tratas	- Sarana tempat pelelangan ikan yang belum representatif - Pencemaran air, tanah, udara	Air, flora, fauna
	- Pengaturan berbagai kegiatan pembangunan industri di wilayah pesisir termasuk dalam hal penanganan limbah industri**	Darat	Muncar	- Letak perusahaan yang berhimpitan dengan pemukiman - Seluruh usaha pengolahan ikan belum ada sarana IPAL - Pencemaran limbah industri - Penanganan pencemaran belum berlangsung secara terintegrasi	Air, flora, fauna
Dinas Kimpraswil Kabupaten Banyuwangi	- Pemukiman di sekitar bantaran sungai **	Darat	Bantaran sungai Kalimati	- Pencemaran limbah domestik - Sistem sanitasi dan drainase kurang sempurna	Air, flora, fauna

Lampiran 5. Profil kegiatan dan masalah di pesisir Muncar (Lanjutan)

Instansi	Kegiatan	Komponen Kegiatan	Lokasi	Masalah	Komponen Lingkungan Hidup
Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	- Pembangunan sarana dan prasarana di bidang rekayasa pantai **	Darat	Muncar	- Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan RDTRK muncar Tahun 1991/1992-2013/2015	Air, flora, fauna
	- Pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut *	Darat, Air	Pesisir Muncar	- Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran/penyimpangan RDTRK maupun lingkungan hidup - Infrastruktur - Konflik sosial karena limbah minyak yang dibuang ke selokan dimanfaatkan oleh penduduk sekitar - Rendahnya kesadaran masyarakat akan peran lingkungan - Kurang berpartisipasi masyarakat pada pengelolaan limbah - Monitoring lingkungan dan audit terhadap industri belum dilakukan secara teratur	Air, flora, fauna

* : Dinas Perikanan dan Kelautan, dokumen REA II tahun 2004

** : BAPPEDA, dokumen penataan ruang kawasan Muncar

Lampiran 6. Variabel dan indikator penelitian

No	Variabel Penelitian	Indikator	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Responden		Presentase (%)
					Instansi terkait	Masyarakat	
1.	Pengetahuan responden tentang perencanaan pengelolaan pesisir terpadu	- mengetahui pengertian perencanaan pesisir terpadu - mengetahui proses perencanaan pesisir Muncar selama ini - mengetahui peran “stakeholders” dalam perencanaan pengelolaan pesisir - mengetahui manfaat yang selama ini dilakukan - mengetahui pentingnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pesisir	1. apa anda tahu tentang perencanaan pengelolaan pesisir terpadu ?	a. tahu b. tidak tahu	10 -	4 1	93,33 6,67
			2. bagaimana proses perencanaan pesisir muncar selama ini?	a. <i>bottom up</i> b. <i>top down</i> c. tidak tahu	9 1 -	- 4 1	60,01 26,64 6,67
			3. apakah anda selalu dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan pesisir?	a. ya b. tidak selalu c. tidak pernah	7 3 -	- 4 1	46,67 46,67 6,67
			4. sejauh mana peran “stakeholders” selama ini?	a. aktif b. pasif c. tidak tahu	8 - 2	5 - -	76,47 - 23,52

			5. mengapa anda berpartisipasi dalam perencanaan pesisir ? 6. apakah perencanaan selama ini bermanfaat? 7. apakah perencanaan yang melibatkan masyarakat perlu dilakukan?	a. kesadaran diri b. status sebagai tokoh masyarakat c. pengabdian pada masyarakat a. ya b. tidak a. ya b. tidak	- - 10 10 - 15 0	5 2 - 4 - - -	33,33 13,33 66,67 94,11 5,88 100
2.	Kesadaran "stakeholders" untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan pesisir di Muncar	- faktor pendorong dalam perencanaan pesisir - faktor penghambat dalam perencanaan	1. faktor apa yang mendorong dalam perencanaan pesisir ?	a. keinginan masyarakat untuk berpartisipasi b. upah	2 1	5 2	46,67 20

			2. faktor apa yang menghambat dalam perencanaan pengelolaan pesisir Muncar ?	a. pelaksanaan tidak sesuai rencana kerja	10	3	86.67
				b. masyarakat tidak dilibatkan sampai pengambil keputusan	-	5	33.33
				c. tidak bisa menentukan skala prioritas	5		33.33

Sumber : Hasil Penelitian 2007